KOMITE EKONOMI NASIONAL

Gedung AA Maramis II Lt.3

Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4, Jakarta 10710

Telp. 021-3852478; Fax. 021-3852478

LAPORAN AKHIR

TIM KAJIAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT LOKAL DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN

JUNI 2011

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Rumusan Masalah 6

1.3. Tujuan Penelitian 6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 6

2.1. Konsep Pemberdayaan Masyarakat 6

2.2. Konsep PNPM Mandiri 9

BAB III METODE PENELITIAN 13

3.1. Ruang Lingkup Penelitian 13

3.2. Jenis dan Sumber Data 15

3.3. Menentukan Penentuan Lokasi 15

3.4. Analisis dan Pengolahan Data 19

BAB IV HASIL PENELITIAN 20

4.1. Perkembangan Kemsikinan 20

4.2. Perkembangan PNPM 23

4.3. Hasil Kunjungan ke Daerah 33

4.3.1. Kota Semarang 62

4.3.2. Kab. Musi Banyuasin 54

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 74

5.1. Kesimpulan 74

5.2. Rekomendasi 76

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi dunia pascakrisis minyak, krisis keuangan global, hingga krisis utang yang melanda Uni Eropa/UE belum sepenuhnya pulih. Perekonomian Amerika Serikat/AS belum mampu bergerak karena tekanan krisis keuangan yang mulai menjalar ke sektor lain. Krisis pun semakin parah karena sudah menjalar kepada krisis utang. Bahkan, ancaman krisis default utang AS semakin mendekati kenyataan. Meski ancaman default utang AS dapat dihilangkan, kekhawatiran tentang perkembangan ekonomi AS masih terjadi. Penurunan petingkat utang oleh S & P memberikan signal akan buruknya kondisi keuangan AS. Rasio utang AS hampir menembus level 100 persen dari Produk Domestik Bruto/PDB, jauh dari ketentuan batas aman yang ditetapkan oleh *International Monetary Fund*/IMF.

Setali tiga uang dengan AS, perekonomian UE juga masih bermasalahan dalam pengelolaan utang. Perekonomian negara-negara pengguna mata uang euro tersebut tertekan karena perkembangannya hanya tergantung pada perekonomian Jerman. Jerman masih mampu tumbuh dengan topangan kinerja ekspor. Pada bagian lain, permasalahan krisis utang yang telah lama membalut UE semakin nyata ketika masuknya Portugal sebagai calon pasien IMF. Tingkat pengguran di beberapa negara EU juga semakin mengkhawatirkan.

Sementara itu, kinerja perekonomian Indonesia hingga Semester I 2011 cukup menggembirakan. Indonesia tumbuh hingga 6,5 persen (yoy) sehingga membawa PDB dengan harga belaku pada Semester I 2011 sekitar Rp1.811,1 triliun, sementara dari sisi harga konstan mencapai Rp611,1 triliun. Namun, sebagian besar sumbangan PDB tersebut masih mengikuti pola sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Jawa masih menyumbang PDB tertinggi di atas 57 persen, Sumatera 23 persen, Kalimantan dan Sulawesi masing-masing 9,5 persen

dan 4,7 persen. Pada bagian lain Bali dan Nusa Tenggara serta Maluku dan Papua menyumbang di bawah tiga persen terhadap PDB Nasional (Tabel 1.)

Tabel 1.1.1 Perkembangan Distribusi PDB Menurut WIlayah

Wilayah/Pulau	2009	2010	2011	
			Tr I	Tr II
1. Sumatera	22,6	23,1	23,5	23,5
2. Jawa	58,6	58,0	57,9	57,7
3. Bali dan Nusa Tenggara	2,7	2,7	2,5	2,5
4. Kalimantan	9,2	9,2	9,3	9,5
5. Sulawesi	4,6	4,6	4,6	4,7
6. Maluku dan Papua	2,3	2,4	2,2	2,1

Sumber: Diolah dari Badan Pusat Statistik, 2011

Selain masalah ketimpangan distribusi PDB, pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga kini masih bersifat eksklusif, artinya baru didorong dan dinikmati oleh golongan ekonomi atas. Oleh karena itu pencapaian kinerja menyisakan berbagai persoalan terutama kualitas pertumbuhan ekonomi. Dua indikator yang dapat digunakan untuk memperkuat argumen tersebut adalah tingginya angka pengangguran dan angka kemiskinan. Tingkat pengangguran terbuka di Indonesia mencapai 6,8 persen per Februari 2011 dengan jumlah penduduk miskin mencapai 30,02 juta atau 12,49 persen dari total penduduk.

Pertama, dalam perbandingan dengan beberapa negara Asia Pasifik, tingkat pengangguran di Indonesia tergolong tinggi serta mengalami peningkatan signifikan dari 1990. Publikasi *Asian Development Bank*/ADB Tahun 2010 yang menyajikan perkembangan tingkat pengangguran beberapa negara Asia Pasifik dan disimpulkan terjadi peningkatan tingkat pengangguran di beberapa negara. Indonesia menjadi negara dengan peningkatan pengangguran tertinggi selama 1990-2009; dengan peningkatan hingga 4,64 persen; disusul Singapura dan China masing-masing naik 2,4 persen dan 1,8 persen. Beberapa negara yang mengalami perbaikan tingkat pengangguran seperti Malaysia, Myanmar, Filipina, dan Thailand, masing-masing membaik pada kisaran 0,2 persen hingga 1,4 persen (Tabel 1.1.2).

Tabel 1.1.2. Tingkat Pengangguran Beberapa Negara Asia Pasifik

Negara	1990	2009	Gap
China	2,5	4,3	1,8
Korea	2,4	3,6	1,2
Indonesia	2,5	6,8 (2010)	4,3
Malaysia	5,1	3,7	-1,4
Myanmar	4,2	4,0 (2008)	-0,2
Filipina	8,4	7,5	-0,9
Singapura	1,7	4,1	2,4
Thailand	2,2	1,5	-0,7
Vietnam	2,3 (2000)	2,4 (2008)	0,1

Sumber : Diolah dari *Asian Development Bank*, 2010

Kedua, angka kemiskinan di Indonesia belum banyak menurun, baik dari jumlah maupun persentase. Beberapa indikator kemiskinan seperti proporsi penduduk berpendapatan di bawah USD2 per hari, rasio 20 persen pendapatan tertinggi terhadap 20 persen pendapatan terendah serta koefisien gini rasio di Indonesia, masih jauh dari kinerja negara lain di Kawasan Asia Pasifik. Pada 1995, sekitar 77,2 persen penduduk Indonesia berpendapatan di bawah USD2 per hari jauh di atas Thailand dan Filipina masing-masing 17,5 persen dan 52,6 persen.

Pada 2005, proporsi penduduk berpendapatan di bawah USD2 per hari di Indonesia menyusut signifikan mencapai 22,6 persen, penurunan tertinggi ketiga setelah China dan Viet Nam. Pada 1995 dan 1993, proporsi penduduk berpendapatan di bawah USD2 per hari di India dan Viet Nam masing-masing 75,5 persen dan 85,7 persen dan menjadi 35,7 persen dan 48,4 persen pada 2005 dan 2006. Selama periode 1993 hingga 2005 proporsi penduduk China yang berpendapatan di bawah USD2 per hari menyusut hingga 39,8 persen sedangkan Viet Nam menyusut 37,3 persen pada periode 1993-2006.

Distribusi ketimpangan pendapatan di Indonesia juga menunjukkan peningkatan dari 0,3444 pada 1993 menjadi 0,376 pada 2007. Hal yang sama juga dialami oleh negara-negara lain seperti India, naik dari 0,329 pada 1993 menjadi 0,368 pada 2005. Koefisien gini rasio di Viet Nam dan Filipina juga meningkat masing-masing 0,021 dan 0,011. Perbaikan koefisien gini rasio dicapai

oleh Lao PDR; Malaysia dan Thailand masing-masing menyusut 0,023; 0,106; dan 0,0009 (Tabel 1.1.3).

Tabel 1.1.3. Perkembangan Indikator Kemiskinan Beberapa Negara Asia Pasifik

	Proporsi Pendapatan (PPP) Penduduk di bawah USD2 per hari (%)		Rasio 20% Pendapatan Tertinggi terhadap 20% Pendapatan Terendah		Koefisien Gini Rasio	
	1995	Tahun Terakhir	1995	Tahun Terakhir	1995	Tahun Terakhir
China	75,5	35,7 (2005)	...	8,3 (2005)	...	0,415 (2005)
India	81,7 (1993)	75,6 (2005)	...	5,6 (2005)	0,329(1993)	0,368 (2005)
Indonesia	77,2 (1996)	54,6 (2005)	5,2(1993)	6,2 (2007)	0,344(1993)	0,376 (2007)
Lao PDR	84,8 (1992)	76,9 (2002)	5,4(1997)	4,9 (2002)	0,349(1997)	0,326 (2002)
Malaysia	11	7,8 (2004)	12,2	7,0 (2004)	0,485	0,379 (2004)
Filipina	52,6 (1994)	45,0 (2006)	8,3(1994)	9,0 (2006)	0,429(1994)	0,440 (2006)
Thailand	17,5 (1996)	11,5 (2004)	8,4(1996)	8,1 (2004)	0,434(1996)	0,425 (2004)
Viet Nam	85,7 (1993)	48,4 (2006)	5,6(1993)	6,4 (2006)	0,357(1993)	0,378 (2006)

Sumber : Diolah dari *Asian Development Bank*, 2010

Pada Maret 2009, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 31,02 juta jiwa dimana 18,97 juta jiwa penduduk miskin berada di perdesaan sisanya (11,05 juta jiwa) berada di perkotaan. Secara persentase, sebesar 15,72 persen penduduk miskin berada di perdesaan, sedikit menyusut dari 16,56 persen pada Maret 2010. Pada bagian lain, persentase penduduk miskin di perkotaan turun lebih kencang; dari 9,87 persen per Maret 2009 menjadi 9,23persen pada Maret 2010.

Upaya menekan angka kemiskinan merupakan target kebijakan pemerintah yang sejalan dengan program *Triple Track Strategy* '*pro-growth*, *pro-poor*, dan *pro-employment*'. Selain itu, program tersebut merupakan salah satu target *Millennium Development Goals*/MDGs. Secara jelas target pertama MGDs adalah terkait dengan masalah kemiskinan yakni menurunkan proporsi penduduk yang tingkat pendapatannya di bawah US$1 per hari menjadi setengahnya dalam kurun waktu 1990-2015. Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah telah menempuh sejumlah kebijakan. Kebijakan tersebut dapat dibagi menjadi dua cakupan, baik menjadikan masyarakat bersifat pasif (hanya penerima saja) atau yang menuntut partisipasi aktif masyarakat.

Konsep pemberdayaan menuntut terciptanya suatu lingkungan berkualitas yang menjamin keselarasan antara *stakeholder* yang ada. Oleh karena itu kesuksesan pemberdayaan kelompok bukan saja tergantung dari pemerintah tetapi juga *stakeholder* baik di pusat maupun di daerah, seperti usahawan, organisasi non-pemerintah regulator dengan kelompok yang akan diberdayakan. Selain itu strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat harus dapat mendekati level ekonomi masyarakat dan menfokuskan pada kearifan lokal. Hal tersebut setidaknya dilakukan dengan mempelajari potensi dan kekayaan baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam.

Salah program pengentasan kemiskinan di Indonesia adalah Pemberdayaan Masyarakat/PNPM Mandiri. Program yang diluncurkan oleh pemerintah pada 2007 ini merupakan perluasan dari program-program penanggulangan kemiskinan pada era sebelumnya. Sedikitnya terdapat dua pilar utama PNPM Mandiri yaitu Program Pengembangan Kecamatan/PPK dan program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan/P2KP. Hingga 2009, PNPM Mandiri telah dilaksankana hingga 32 provinsi mencakup 348 kabupaten; 3.905 kecamatan dan 50.201 desa di Indonesia (Tabel 1.1 4).

Tabel 1.1.4. Perkembangan Lokasi PNPM Mandiri Perdesaan

Level Pemerintahan	Cakupan Wilayah			Total s.d tahun 2009
	1998-2003	2004-2008	2009	
Provinsi	32	30	30	32
Kabupaten	348	335	342	348
Kecamatan	2.668	2.230	3.905	3.905
Desa	42.319	34.032	50.201	50.201

Alokasi Anggaran PNPM Mandiri Perdesaan tahun 2009 (dalam Rupiah)			
Jumlah Keseluruhan	Sumber Dana APBD	Sumber Dana APBN	
		Rupiah Murni	Pinjaman
6.323.957.500.000	1.285.987.500.000 (20,34%)	3.800.603.572.000 (60,10%)	1.237.366.428.000 (19,57%)

Sumber : Laporan Tahunan PNPM Tahun 2009, 2010

Untuk mendukung tercapainya target program, pemerintah menggelontorkan dana hingga Rp6,3 triliun pada 2009. Menurut sumbernya, dana tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/APBN dan

partisipasi daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sebagian dari dana tersebut turut bersumber dari pinjaman luar negeri. Pada 2009, dari dana Rp6,3 triliun, sekitar 20,34 persen berasal dari APBN dan 19,57 persen dari pinjaman luar negeri. Porsi tersebut dari dana tersebut bersumber dari APBN, mencapai 60,10 persen.

1.2. Rumusan Masalah

Program PNPM Mandiri yang digagas pemerintah sejak 2007 memberikan pengaruh besar terhadap masyakarat. Namun, tidak semua program PNPM tersebut berjalan sesuai dengan acuan pemerintah karena banyak ditemukan berbagai kendala-kendala di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengurai berbagai permasalahan implementasi PNPM khususnya PNPM Perdesaan di Indonesia.

Adapun masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana Mengevaluasi program PNPM di Indonesia, baik untuk perdesaan maupun perkotaan.
2. Memetakan permasalah implementasi program PNPM di Indonesia.

1.3. Tujuan Penelitian

1. Mendapatkan Evaluasi Program PNPM di Indonesia, baik PNPM Perdesaan maupun Perkotaan
2. Menghasilkan implementasi Program PNPM di Indonesia

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini dikenal dengan ***Partisipatory Rapid Appraissal*** (PRA) yang mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat "*people-centered, participatory, empowering, and sustainable*" (Chambers, 1995).

Konsep ini lebih luas dari hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (*safety net*), yang pemikirannya belakangan ini banyak dikembangkan sebagai upaya mencari alternatif terhadap konsep-konsep pertumbuhan di masa yang lalu. Dalam kerangka pikiran itu, upaya memberdayakan masyarakat, dapat dilihat dari tiga sisi (Kartasasmita, 1997)

Pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang *(enabling).* Di sini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena, kalau demikian akan sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong memotivasikan dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

***Kedua**,* memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat *(empowering).* Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan *(input),* serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang *(opportunities)* yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya. Dalam rangka pemberdayaan ini, upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan, serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar. Masukan berupa pemberdayaan ini menyangkut pembangunan prasarana dan sarana dasar baik fisik, seperti irigasi, jalan, listrik, maupun sosial seperti sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan, yang dapat dijangkau oleh masyarakat pada lapisan paling bawah, serta ketersediaan lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan, dan pemasaran di perdesaan, di mana terkonsentrasi penduduk yang keberdayaannya amat kurang.

Untuk itu, perlu ada program khusus bagi masyarakat yang kurang berdaya, karena program-program umum yang berlaku untuk semua, tidak selalu dapat menyentuh lapisan masyarakat ini. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, dan kebertanggungjawaban adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan ini.

Demikian pula pembaharuan institusi-institusi sosial dan pengintegrasiannya ke dalam kegiatan pembangunan serta peranan masyarakat di dalamnya.

Ketiga, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.

Pendekatan PRA bertujuan menjadikan warga masyarakat sebagai *peneliti*, *perencana*, *pelaksana program pembangunan* dan bukan sekedar obyek pembangunan. Dengan demikian, tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat, memampukan, dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara sinambung.

2.2. Konsep PNPM Mandiri

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan, merupakan program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan membangun kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan. Artinya pemulihan hak-hak masyarakat dalam pembangunan menjadi koridor pencapaian tujuan. Dengan demikian pulihnya hak-hak masyarakat dalam

pembangunan di setiap desa lokasi PNPM Mandiri Perdesaan merupakan suatu proses yang menunjukkan tercapai tidaknya tujuan program.

Proses dan koridor tersebut telah menempatkan PNPM Mandiri Perdesaan menggunakan perubahan sosial sebagai perspektif yang melandasi kerangka berpikir logis pelaksanaannya. Menurut Selo Sumarjan , Perubahan Sosial adalah segala perubahan-perubahan pada lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Tekanan pada definisi tersebut terletak pada lembaga-lembaga kemasyarakatan sebagai himpunan pokok manusia, perubahan-perubahan mana kemudian mempengaruhi segi-segi struktur masyarakat lainnya. Perubahan sosial kadang juga disebut dengan perubahan kebudayaan. Perubahan kebudayaan adalah suatu perubahan yang terjadi terhadap unsur-unsur kebudayaan. Unsur-unsur kebudayaan tersebut yakni sistem pengetahuan, sistem organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian/ekonomi, sistem religi, bahasa dan kesenian.

Dalam konteks PNPM Mandiri Perdesaan, yang merupakan suatu program pembangunan sosial yang membawa suatu perubahan dalam masyarakat, maka perubahan tersebut dilakukan diawali dengan cara menanamkan konsepsi, sistem nilai, sistem norma, sistem pengetahuan dan sistem sosial yang ‘baru’ yang menyertai sistem pembangunan desa partisipatif dengan menggunakan pendekatan pembelajaran sosial.

Dalam prosesnya, konsepsi, sistem nilai, sistem norma dan sistem sosial tersebut diperkenalkan kepada warga masyarakat dengan mengkomunikasikannya melalui berbagai media diantara media yang digunakan adalah melalui pertemuan formal-informal, praktek-praktek sosial dan dukungan media lainnya (seperti panduan, petunjuk teknis, paket informasi, poster, leaflet, flipchart) yang disebarluaskan kepada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat mengetahui dan memahami berbagai informasi seperti konsepsi, nilai-nilai, prosedur dan aturan program.

Selanjutnya di tataran masyarakat, melalui suatu proses tahapan yang dikondisikan, masyarakat diharapkan memperoleh pembelajaran melalui praktek-praktek sosial, forum-forum musyawarah, yang mana masyarakat saling berinteraksi memainkan peran di dalamnya dalam rangka pemenuhan tuntutan sesuai konsepsi, nilai-nilai dan sistem norma program. Proses-proses interaksi ini yang pada akhirnya membentuk suatu sistem sosial baru yang menempatkan kesamaan hak dan kewajiban setiap warga masyarakat dalam pembangunan desa.

Sehubungan dengan hal itu, pengembangan teknik dan prosedur dalam melaksanakan suatu kegiatan merupakan salah satu cara dalam mewujudkan konsepsi, nilai-nilai dan norma agar menjadi tindakan yang sesuai dengan nilai budaya yang dibawa program. Misalnya, di dalam musyawarah perencanaan di desa, yang merupakan media pembelajaran bagi masyarakat yang dilembagakan dalam proses pengambilan keputusan perencanaan pembangunan desa, teknik

dan prosedur yang dikembangkan bertujuan untuk menjamin konsepsi dan nilai-nilai program seperti musyawarah dalam pengambilan keputusan, keterlibatan aktif semua lapisan masyarakat (terutama masyarakat miskin), transparansi dan akuntabilitas dapat berjalan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini pada dasarnya mengacu pada program nasional, PNPM Mandiri yaitu program nasional yang menjadi kerangka kebijakan dan acuan pelaksanaan berbagai program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Mengingat luasnya cakupan program PNPM Mandiri yang mencakup PNPM Perkotaan, PNPM Perdesaan, PNPM Daerah Tertinggal dan Khusus (DTK), PNPM Infrastruktur Perdesaan dan PNPM Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), maka dalam studi ini tekanannya pada PNPM Perdesaan dan PNPM Perkotaan.

Hal tersebut mengingat PNPM Perdesaan dan PNPM Perkotaan merupakan program yang paling luas cakupannya dan langsung bersentuhan pada masyarakat lokal di perdesaan/perkotaan. Dengan demikian yang menjadi kajian dari studi pemberdayaan masyarakat lokal bagi peningkatan kesejahteraan adalah :

a. Aspek Pengembangan Masyarakat

Aspek pengembangan masyarakat ini dilakukan antara lain melalui upaya membangun kesadaran kritis masyarakat refleksi kemiskinan, pemetaan potensi, masalah, dan kebutuhan masyarakat, perencanaan partisipatif, pengorganisasian masyarakat, pemanfaatan sumberdaya, pemantauan, hingga pemeliharaan hasil pembangunan, terutama melalui Komunitas Belajar tingkat masyarakat.

Aspek ini bertujuan membangun kesadaran kritis masyarakat untuk menuju kemandirian melalui pemetaan potensi, masalah, dan kebutuhan, perencanaan partisipatif, pengorganisasian, pemanfaatan, sumber daya, dan pemeliharaan hasil-hasil yang telah dicapai. Aspek ini memerlukan dukungan fasilitator pemberdayaan dan teknis dalam pengembangan masyarakat ini.

b. Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)

Dana stimulan atau pelengkap keswadayaan masyarakat sebagai sarana untuk mengimplementasikan kegiatan yang telah direncanakan masyarakat. Dengan demikian aspek BLM ini bertujuan pada adanya dana stimulan keswadayaan untuk membiayai sebagian kegiatan, terutama untuk masyarakat miskin

c. Peningkatan Kapasitas Pemerintahan dan Pelaku Lokal

Pendampingan untuk Pemda dalam memfasilitasi kegiatan masyarakat melalui kegiatan seminar, pelatihan, lokakarya, kunjungan lapangan secara selektif, terutama melalui Komunitas Belajar tingkat kota/kabupaten. Aspek ini bertujuan agar kelembagaan yang ada untuk mampu menciptakan kondisi yang kondusif dan sinergi positif bagi masyarakat (terutama kelompok miskin) dalam menyelenggarakan kehidupan yang layak.

d. Bantuan Pengelolaan dan Pengembangan Program

Aspek ini bertujuan untuk menjamin terlaksananya program secara tepat dan akuntabel dan memungkinkan kelompok peduli untuk terlibat langsung (seperti pengendalian mutu dan evaluasi program). Kegiatan untuk mendukung pemerintah dan berbagai kelompok peduli lainnya dalam pengelolaan kegiatan program, pengendalian mutu, kegiatan studi dan evaluasi, serta penyempurnaan dan pengembangan program.

Selanjutnya dapat diidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program yaitu:

a. Faktor budaya/adat-istiadat setempat (lokal);
b. Tingkat pendidikan dari pelaksana dan target sasaran (masyarakat);
c. Ada tidaknya dukungan daerah yang tercermin dalam anggaran (APBD);
d. Dukungan Pemerintah dalam bentuk kebijakan dan program yang berbasis pemberdayaan masyarakat.

3.2. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini akan menggunakan metode kuantitatif berdasarkan analisis statistik dan metode kualitatif berdasarkan pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer berupa hasil survei lapangan melalui berbagai *Focus Group Discussion/*FGD dan *in-depth interview* di dalam negeri (tingkat nasional, provinsi dan kabupaten).

Beberapa langkah yang dilakukan untuk memeroleh data adalah dengan mempelajari konsep yang diterapkan di luar negeri yang relevan dan bisa dijadikan proses pembelajaran, sedangkan pengumpulan data sekunder berasal dari berbagai publikasi resmi di dalam negeri maupun luar negeri. Dengan perpaduan kedua metode tersebut diharapkan dapat memberikan hasil studi pemberdayaan masyarakat lokal yang mendalam dan tepat sasaran.

3.3. Metode Penentuan Lokasi

Sesuai dengan program PNPM yang tersebar di seluruh Indonesia maka dalam penentuan lokasi studi akan dilakukan secara berjenjang (*stratified*) dengan metode acak sederhana (*simple random sampling*). Namun mengingat sebaran lokasi yang cukup luas dari Provinsi NAD sampai Papua (ada 33 provinsi), maka penentuan lokasi yang menyebar di berbagai lokasi dilakukan secara sengaja (*purposive*) dengan menunjuk pada lokasi PNPM berdasarkan lokasi geografis yang ada di Indonesia, yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi.

Selanjutnya untuk masing-masing pulau akan ditentukan satu provinsi, dan satu kabupaten dengan mengambil sampel lokasi PNPM Perdesaan dan PNPM Perkotaan. Adapun lokasi yang dipilih secara sengaja (*purposive*), adalah :

1. Pulau Sumatera dipilih Provinsi Sumatera Selatan
2. Pulau Jawa/Bali dipilih Provinis Jawa Tengah
3. Pulau Kalimantan dipilih Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar)
4. Pulau Sulawesi dipillih Provinsi Sulawesi Tengah

Untuk tiap Kabupaten terpilih akan dipilih tiga PNPM Perdesaan dan tiga PNPM Perkotaan dengan mempertimbangkan jumlah penduduk dan tingkat kemiskinan yang ada serta tingkat keberhasilan (*key success factor*) . Dengan demikian sebaran sampel untuk masing-masing lokasi studi dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.1.1. Jenis, Jumlah dan Lokasi Responden

No	Pulau	Provinsi	Kabupaten/Kota	Kecamatan /Desa	Kategori *
1.	Sumatera	Sumsel	Palembang	Gandus	Miskin
				Kemuning	Sedang
				Alang-alang Lebar	Tidak Miskin
			Musi Banyuasin	Sekayu	Miskin
				Pelaka Tinggi	Sedang
				Babat Toman	Tidak Miskin
2.	Jawa/Bali	Jawa Tengah	Kota Semarang	Tugu	Miskin
				Pedurungan	Sedang
				Semarang Timur	Tidak Miskin
			Kab. Katen	Ceper	Miskin
				Cawas	Sedang
				Karang Nongko	Tidak Miskin
3.	Kalimantan	Kalimantan Barat	Pontianak	Pontianak Utara	Miskin
				Pontianak Timur	Sedang
				Pontianak Kota	Tidak Miskin
			Kab. Kayong Utara	Maya Karimata	Miskin
				Sukadana	Sedang
				Sponti	Tidak Miskin
4.	Sulawesi	Sulawesi Tengah	Kota Palu	Palu Utara	Miskin
				Palau Selatan	Sedang
				Palu Timur	Tidak Miskin
			Kab. Dongala	Banawa	Miskin
				Banawa Tengah	Sedang
				Banawa Selatan	Tidak Miskin
	Total	**4**	**8**	**25**	

**) Kategori berdasarkan definisi sesuai dengan Program PNPM*

Jenis dan Jumlah responden:

1. Untuk tiap-tiap kabupaten terpilih akan dipilih 3 kecamatan yang memiliki Program PNPM Perdesaan dan PNPM Perkotaan yang mewakili kategori Miskin, Sedang dan tidak miskin. Dengan demikian akan ada 6 responden PNPM di tiap kabupaten terpilih.
2. Untuk tiap Kabupaten terpilih akan diwawancarai responden yang terdiri atas:

a. Fasilitator Kabupaten (F-kab) dan Fasilitator Teknik Kabupaten (FT-Kab)

- Fasilitator Kabupaten adalah tenaga profesional yang berkedudukan di tingkat Kabupaten. Peran Fasilitator Kabupaten adalah sebagai supervisor atas pelaksanaan tahapan PNPM Mandiri Perdesaan di lapangan yang difasilitasi oleh Fasilitator Kecamatan dan memfasilitasi perencanaan koordinatif di tingkat kabupaten. Fasilitator Kabupaten harus memastikan setiap tahapan pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan/Perkotaan dapat selesai dengan baik, tepat waktu dengan tetap mengacu pada prinsip dan prosedur PNPM Mandiri Perdesaan/Perkotaan. Fasilitator Kabupaten juga berperan dalam memberikan bimbingan atau dukungan teknis kepada pelaku PNPM Mandiri Perdesaan/Perkotaan di kecamatan dan desa. Dia juga berperan dalam mendorong munculnya forum lintas pelaku atau sejenisnya, sebagai media pembelajaran pemberdayaan masyarakat. Dalam menjalankan perannya, Fasilitator Kabupaten harus melakukan koordinasi dengan dinas/instansi yang ada di kabupaten dan Tim Koordinasi PNPM Mandiri Kabupaten yang ada di wilayah kerjanya.
- Fasilitator Teknik Kabupaten adalah tenaga konsultan teknik dan manajerial professional yang berkedudukan di tingkat Kabupaten dan berperan sebagai supervisor atas hasil kualitas teknik kegiatan pembangunan prasarana perdesaan pada perencanaan desain dan RAB, survei dan pengukuran, pelaksanaan, serta operasi dan

pemeliharaan. Fasilitator Teknik Kabupaten harus memastikan pelaksanaan kegiatan prasarana selesai dengan kualitas baik, selesai tepat waktu, dan tetap mengacu pada prinsip dan prosedur PNPM Mandiri Perdesaan /Perkotaan serta sesuai kaidah atau standar teknik prasarana. Dia juga berperan dalam memberikan bimbingan atau dukungan tentang kaidah dan standar teknis prasarana Perdesaan kepada pelaku PNPM Mandiri Perdesaan/Perkotaan di kecamatan dan desa

b. Fasilitator Kecamatan (F-Kec) dan Fasilitator Teknik Kecamatan (FT-Kec)

adalah pendamping masyarakat dalam mengikuti atau melaksanakan PNPM Mandiri Perdesaan/Perkotaan. Peran FK dan FT adalah memfasilitasi masyarakat dalam setiap tahapan PNPM Mandiri Perdesaan/Perkotaan pada tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian. FK dan FT juga berperan dalam membimbing kader-kader desa atau pelaku-pelaku PNPM Mandiri Perdesaan/Perkotaan di desa dan kecamatan.

c. Koordinator Fasilitator/Tim Koordinasi Kabupaten (KF-Kab)

Tim Koordinasi PNPM Mandiri Kabupaten dibentuk oleh Bupati untuk melakukan pembinaan pengembangan peran serta masyarakat, pembinaan administrasi, dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat pada seluruh tahapan program PNPM Mandiri Perdesaan. TK-PNPM Mandiri Kab juga berfungsi dalam memberikan dukungan koordinasi program antar instansi, pelayanan dan proses administrasi di tingkat kabupaten. Dalam melaksanakan fungsi dan perannya, TK PNPM Mandiri Kab dibantu oleh Sekretariat PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten.

3. Untuk responden target sasaran program PNPM, akan diwawancarai

   a. Rumah Tangga (RTM) penerima program di perdesaan/perkotaan,

b. Kelembagaan masyarakat di perdesaan (Badan Permusyawarahan Desa)

c. Kelembagaan pemerintahan lokal

d. Kepala desa/Tokoh Masyarakat

e. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

4. Wawancara atau *Focus Group Discussion (FGD)* juga akan dilakukan dengan para pelaksana program PNPM yang ada di Kabupaten yang difasilitasi oleh Kantor/bagian Pemberdayaan Masyarakat dan pejabat/instansi terkait.

3.4. Analisis dan Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari hasil wawancara baik berupa data primer dari responden utama/primer seperti Rumah Tangga Sasaran, Kelembagaan masyarakat (BPD), kepala desa/tokoh masyarakat maupun fasilitator akan diolah dengan menggunakan metode deskriptif/statistik seperti persentase, rata-rata, minimum-maksimum, dll. Sedangkan data sekunder yang diperoleh dari laporan dan publikasi terkait akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan analisis sebab akibat (*prima causality*) dan analisis kebijakan (*policy analysis*). Dalam upaya melengkapi analisis dan pengolahan data yang ada maka metodologi lain yang akan digunakan dalam penggalian data adalah dengan menggunakan *Rural Rapid Appraisal (RRA)*, yaitu pengenalan kondisi responden/program di lapang/perdesaan secara cepat dan partisipatif.

Dalam Studi Pemberdayaan Masyarakat Lokal bagi peningkatan kesejahteraan ini, beberapa indikator dan variable yang akan dianalisis, antara lain:

a. Tingkat/jumlah penduduk miskin terhadap jumlah penduduk secara keseluruhan

b. Jumlah angkatan kerja/lapangan pekerjaan, tingkat pengangguran dan partisipasi angkatan kerja di perdesaan
c. Tingkat/ angka kematian ibu, angka kematian bayi, kelahiran bayi
d. jumlah usaha produktif/kelembagaan ekonomi yang ada
e. Tingkat partisipasi kelompok/ perempuan dan penduduk miskin
f. Kelembagaan masyarakat yang ada
g. Kondisi kelembagaan ekonomi masyarakat
h. Kondisi sosial budaya/adat-istiadat setempat
i. Model-model pemberdayaan masyarakat yang ada
j. Tingkat pertumbuhan ekonomi di daerah/regional (PDRB)
k. Jumlah anggaran/dana baik dalam bentuk BLM maupun yang bersumber dari APBD/APBN sejak tahun 2007
l. Indikator keberhasilan program seperti aspek pengembangan masyarakat, BLM, peningkatan kapasitas Pemerintah dan pelaku usaha , bantuan pengelolaan dan pengembangan program

BAB IV

PEMBAHASAN PENELITIAN

4.1. Perkembangan Kemiskinan

Pascakrisis moneter 1997/98 performa perekonomian Indonesia menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia selama 2005-2010 mencapai rata-rata 5,67 persen per tahun sedangkan tingkat kemiskinan hingga Maret 2011 mencapai 30,02 juta jiwa atau 12,49 persen dari total penduduk di Indonesia. Sementara itu Tingkat Pengangguran Terbuka/TPT pada Februari 2011 mencapai 6,8 persen. Persentase penduduk miskin tersebut berkurang dari 13,3 persen pada tahun sebelumnya sedangkan TPT membaik dari 7,14 persen.

Dalam perkembangan tersebut, sejak 2005 hingga Triwulan I 2011, persentase penduduk miskin menyusut rata-rata 0,57 persen per tahun sedangkan TPT menyusut rata-rata 0,74 persen per tahun (Grafik 4.1.).

Grafik 4.1.1 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi, Persentase Penduduk Miskin, dan Persentase Pengangguran Terbuka di Indonesia

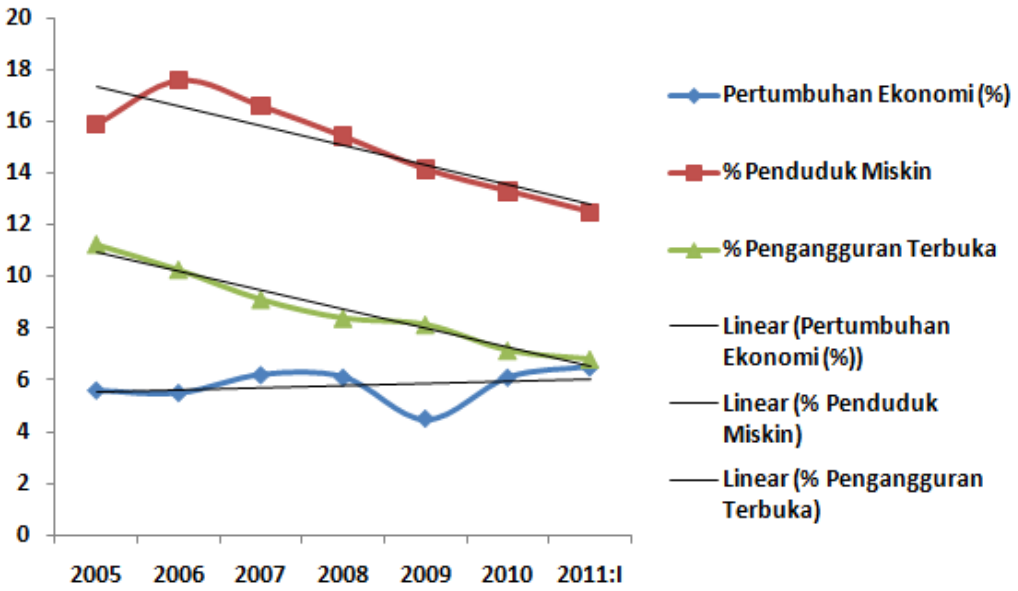

Sumber: Diolah dari Badan Pusat Statistik, 2011

Dalam cakupan nasional, pemerintah telah mengalokasi sekitar Rp56 triliun per tahun dalam mendukung pengentasan kemiskinan selama 2004-2010. Dalam periode tersebut, anggaran kemiskinan tumbuh rata-rata 33,76 persen per tahun. Pada 2004, anggaran kemiskinan baru Rp18 triliun, melonjak menjadi Rp23 triliun dan Rp42 triliun pada dua tahun berikutnya. Sementara itu pada 2007 dan 2008 anggaran kemiskinan menembus level Rp50 triliun dan melonjak menjadi Rp66 triliun dan Rp95 triliun pada 2009 dan 2010. Dengan alokasi anggaran yang demikian jumlah penduduk miskin berkurang rata-rata 0,85 juta per tahun sedangkan menurut persentasenya rata-rata membaik 0,56 persen per tahun (Tabel 4.1.).

Tabel 4.1.1 Perkembangan Alokasi Anggaran, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia

	Anggaran Kemiskinan (Rp Triliun) [a]	Perubahan [a]	Jumlah Penduduk Miskin (juta jiwa) [b]	Perubahan [b]	% Penduduk Miskin [c]	Perubahan [c]
2004	18	-	36,15	-	16,70	-
2005	23	5	35,10	-1,05	16,00	-0,70
2006	42	19	39,08	3,98	17,80	1,80
2007	51	9	37,17	-1,91	16,60	-1,20
2008	63	12	34,96	-2,21	15,40	-1,20
2009	66	3	32,53	-2,43	14,20	-1,20
2010	94	28	31,02	-1,51	13,33	-0,87
Rata-rata	**56**	**12,67**	**34,97**	**-0,85**	**15,55**	-0,56

Sumber: Diolah dari Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik, 2011

Hingga 2010, jumlah penduduk miskin di perkotaan di Indonesia mencapai 11,09 juta. Menurut sebarannya, sebagian besar penduduk miskin berada di Jawa, hal ini sejalan dengan distribusi jumlah penduduknya. Menurut distribusinya, jumlah penduduk miskin di perkotaan, sekitar 7,4 juta jiwa berada di Jawa. Jumlah tersebut mencakup 66,88 persen dari total penduduk miskin di perkotaan di Indonesia. Pada tempat kedua dan ketiga adalah Sumatera dan Bali + Nusa Tenggara masing-masing 2,26 juta dan 744 ribu atau 20,43 persen dan 6,7 persen dari total penduduk miskin di perkotaan Indonesia. Pada bagian lain,

jumlah penduduk miskin di perkotaan Sulawesi, Kalimantan, Maluku + Papua masing-masing 324 ribu, 262 ribu dan 80 ribu. Jika diperhitungkan terhadap jumlah penduduk miskin di perkotaan Indonesia, jumlah penduduk miskin di Sulawesi mencakup 2,92 persen dari total penduduk miskin di perkotaan sementara Kalimantan menyumbang sekitar 2,36 persen terhadap jumlah penduduk miskin di perkotaan Indonesia.

Jumlah penduduk miskin di perdesaan Indonesia mencapai 19,92 juta jiwa, atau mencapai 64,23 persen dari total penduduk miskin Indonesia pada 2010. Sejalan dengan di perkotaan, jumlah penduduk miskin di perdesaan tertinggi berada di Jawa, mencapai 9,89 juta disusul Sumatera dan Sulawesi masing-masing 4,38 juta dan 2,02 juta. Jumlah penduduk miskin di perdesaan Jawa mencakup 49,68 persen dari total penduduk miskin di Indonesia sedangkan di Sumatera dan Sulawesi masing-masing mencapai 22,01 persen dan 10,15 persen dari total penduduk miskin di perdesaan Indonesia. Jumlah penduduk miskin perdesaan di Bali + Nusa Tenggara dan Maluku + Papua serta Kalimantan masing-masing mencapai 1,45 juta; 1,40 juta, dan 756 ribu. Penduduk miskin perdesaan di tiga wilayah tersebut mencakup 7,3 persen; 7,07 persen; dan 3,80 persen dari total penduduk miskin perdesaan di Indonesia (Tabel 4.2.).

Tabel 4.1.2. Perkembangan Penduduk Miskin Perdesaan dan Perkotaan di Indonesia 2010

Propinsi	Jumlah Penduduk Miskin (000)			Pangsa (%)		
	Kota	Desa	Kota+Desa	Kota	Desa	Kota+Desa
Sumatera	2.267	4.385	6.652,70	20,43	22,01	21,44
Jawa	7.422	9.898	17.319,90	66,88	49,68	55,83
Bali + NT	744	1.455	2.198,40	6,70	7,30	7,09
Kalimantan	262	756	1.018,00	2,36	3,80	3,28
Sulawesi	324	2.023	2.347,00	2,92	10,15	7,57
Maluku + Papua	80	1.408	1.487,60	0,72	7,07	4,80
Indonesia	11.098	19.925	31.023,40			

Sumber: Diolah dari BPS, 2011

4.2. Perkembangan PNPM

Pada dasarnya PNPM terdiri dari dua jenis yaitu PNPM-Inti dan PNPM-Penguatan (pendukung). PNPM ini terdiri dari beberapa program yaitu PNPM-Perdesaaan, PNPM Perkotaan, PNPM Infrastruktur Perdesaan, PNPM Infrastruktur Sosial-Ekonomi Wilayah, dan PNPM Daerah Tertinggal dan Khusus. PNPM-Penguatan (Pendukung) terdiri dari beberapa jenis yaitu PNPM Generasi, PNPM Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif, PNPM Rencana Strategis Pengembangan Kamping, PNPM Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pulai Nias, PNPM Pasca Bencana, PNPM HIjau, Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan, Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat, Bantuan Langsung Masyarakat untuk Keringanan Investasi Pertanian, dan PNPM Lainnya.

Ide dasar pembentukan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri/PNPM-Mandiri bertujuan untuk menanggulangan kemiskinan terutama yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Konsep pemberdayaan dimaknai sebagai upaya untuk menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok. Program tersebut berumuara pada upaya memecahkan berbagai permasalahan masyarakat sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat. Terkait dengan itu, upaya pemberdayaan masyarakat harus secara langsung melibatkan masyarakat secara aktif sebagai pelaksana program. Program ini melibatkan beberapa elemen dalam perekonomian yaitu, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.

PNPM merupakan program lanjutan dari PPK pada 1998 dan P2KP pada 1999. PNMP-Mandiri diluncurkan pada 2007 yang salah prinsipnya adalah pelibatan masyarakat dan kesetaraan gender. Sampai 2009, program PNPM sudah mencakup 30 provinsi, 342 kabupaten, 3.905 kecamatan, dan 50.201 desa. Cakupan PNPM bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara/APBN dan Anggara Pendapatan Belanja Daerah/APBD. Dalam Laporan PNPM 2009 disebutkan bahwa sumber dana PNPN dari APBD mencakup Rp1,28 triliun atau

mencakup 20,34 persen dari total dana PNPM sedangkan dari APBN dan pinjaman masing-masing Rp3,8 triliun dan Rp1,23 triliun atau mencakup 60,10 persen dan 19,57 persen dari total dana.

PNPM sedikitnya memiliki tiga program yaitu PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, dan PNPM Mandiri Wilayah Khusus dan Desa Tertinggal. PNPM Mandiri Perdesaan secara harfiah merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan/PPK. PNPM Perdesaan diarahkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya, pelembagaan sistem pembangunan partisipatif, pengefektifan fungsi dan peran pemerintah lokal, peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat serta pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan.

Pada 2007, program pemerintah (P2KP) mengeluarkan dana sekitar Rp4,02 triliun, dan naik menjadi Rp7,21 triliun pada 2008. Jumlah tersebut naik sekitar 79,46 persen dari tahun sebelumnya. Pada 2009, anggaran PNPM meningkat sekitar 31,17 persen (yoy) menjadi Rp9,48 triliun sedangkan pada 2010 tumbuh lebih rendah pada kisaran 24,78 persen (yoy) menjadi Rp11,83 triliun. Nilai PNPM pada 2010 tersebut menjadi angka tertinggi selama 2007 hingga 2010. Sementara itu, jumlah dana yang dianggaran pemerintah untuk PNPM pada 2011 menurun hingga 12,89 persen (yoy) menjadi Rp10,30 triliun.

Sebagian besar dana PNPM tersalurkan pada PNPM-Perdesaan. Selama 2007-2011, dana PNPM-Perdesaan rata-rata Rp6,08 triliun atau mengambil porsi 67,09 persen per tahun. Porsi terbesar kedua adalah PNPM Perkotaan, rata-rata Rp1,66 triliun per tahun atau rata-rata 23,71 persen per tahun, sisanya tersebar pada PNPM Daerah Tertinggal dan Khusus (rata-rata Rp6,6 miliar per tahun atau 0,09 persen dari total dana PNPM), PNPM Infrastruktur Perdesaan (rata-rata Rp23,60 miliar per tahun atau atau 0,28 persen per tahun) dan PNPM Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (rata-rata Rp2,54 miliar atau rata-rata 0,03 persen per tahun). Pada 2011, pemerintah tidak menganggarkan dana untuk PNPM Daerah Tertinggal dan Khusus (Grafik 4.2).

Grafik 4.2.1 Perkembangan Alokasi Dana PNPM di Indonesia

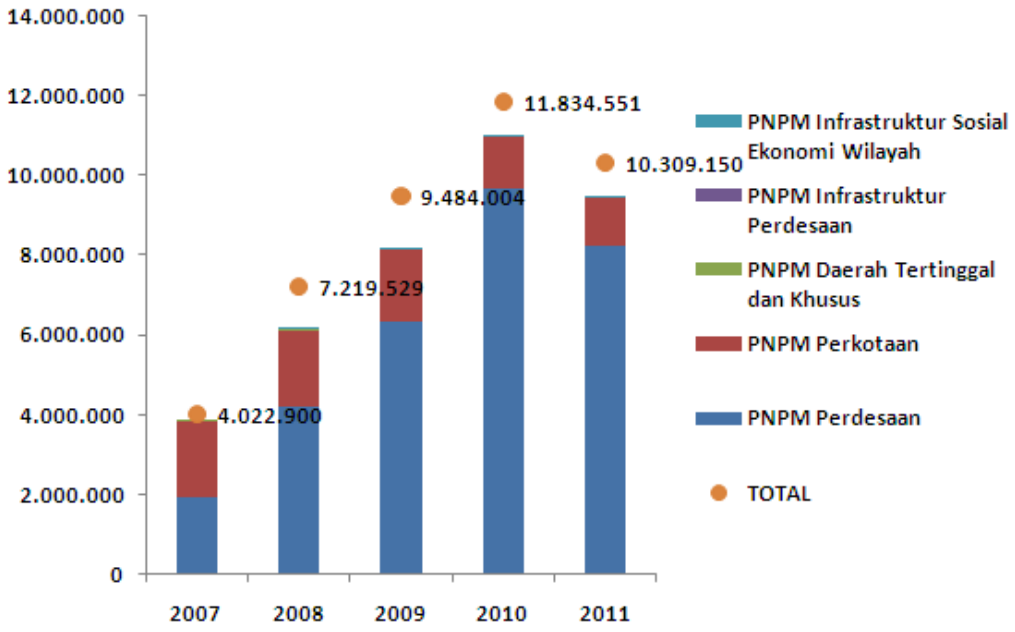

Sumber: Diolah dari Bappenas, 2011

PNPM Perdesaan dijalankan dengan berpegang teguh pada beberapa prinsip seperti bertumpu pada pembangunan manusia, otonomi, desentralisasi, berorientasi pada masyarakat miskin, partisipasi, kesetaraan dan keadilan gender, demokratis, transparansi dan akuntabel, prioritas, dan keberlanjutan. Adapun kelompok sasaran PNPM Perdesaan adalah Rumah Tangga Miskin/RTM di perdesaan, kelembagaan di perdesaan, dan kelembagaan pemerintah lokal. Jenis program yang dilaksanakan oleh PNPM Perdesaan disebut dengan Bantuan Langsung Masyarakat/BPM.

Sampai 2011, pemerintah telah menyalurkan BLM sekitar Rp8,23 triliun atau menyusut 14,99 persen dari tahun sebelumnya. Pada 2010, pemerintah menyalurkan sekitar Rp9,68 triliun. Pada 2011, dana BLM yang disalurkan mencakup 5.020 kecamatan naik dari 4.805 kecamatan pada 2010. Selama 2010-2011 terjadi kenaikan jumlah cakupan kecamatan melonjak sekitar 4,47 persen. Jika melihat sebarannya, sebagian besar BLM berada di Jawa mencakup 31,83 persen pada 2010 sedangkan pada 2011 sekitar 29,08 persen. Kondisi yang sama

juga terjadi pada sebaran kecamatan dimana sebagian besar masih berada di Jawa masing-masing 1.500 kecamatan (Tabel 4.3.)

Tabel 4.2.1 Perkembangan Dana BLM Perdesaan Tahun 2010 dan 2011 Serta Distribusinya

	2010				2011				Pertumbuhan	
	Kec	BLM (Rp Miliar)	*Share* Kec	*Share* BLM	Kec	BLM (Rp Miliar)	*Share* Kec	*Share* BLM	Kec	BLM
Sumatera	1.150	2.441,5	23,93	25,21	1.188	1.944,55	23,67	23,62	3,30	-20,35
Jawa	1.500	3.082,5	31,22	31,83	1.500	2.394,3	29,88	29,08	0,00	-22,33
Bali + NT	355	852,25	7,39	8,80	386	856,9	7,69	10,41	8,73	0,55
Kalimantan	426	725,75	8,87	7,49	479	585,95	9,54	7,12	12,44	-19,26
Sulawesi	756	1.480	15,73	15,28	790	1.253,15	15,74	15,22	4,50	-15,33
Maluku + Papua	618	1.103,75	12,86	11,40	677	1.199,4	13,49	14,57	9,55	8,67
Indonesia	**4.805**	**9.685,75**	**-**	**-**	**5.020**	**8.234,25**	**-**	**-**	**4,47**	**-14,99**

Sumber : Diolah dari PNPM Perdesaan, 2011

Setelah Jawa, porsi terbesar lainnya berada di Sumatera. Untuk cakupan kecamatan, BLM di Sumatera pada 2010 mencapai 1.150 kecamatan naik menjadi 1.188 pada 2011. Dari sisi pendanaan, jumlah dana BLM di Sumatera menyusut hingga 20,35 persen pada 2011; lebih kencang dari penurunan dana BLM di Jawa. Kontras dengan dengan itu, lokasi yang memeroleh BLM terkecil adalah Bali dan Nusa Tenggara. Hal tersebut terjadi baik dari segi jumlah kecamatan maupun dana BLM. Pada 2010, jumlah kecamatan di Kalimantan yang memeroleh BLM sekitar 355 kecamatan atau 7,39 persen dari total nasional, naik menjadi 386 kecamatan pada 2011.

Lonjakan kecamatan penerima BLM di Kalimantan turut meningkatan pangsanya terhadap nasional. Pada 2011 porsi kecamatan di Kalimantan peneriman BLM naik menjadi 7,69 persen. Dari sisi dana BLM, Bali dan Nusa Tenggara hanya menerima Rp852,25 miliar pada 2010 naik menjadi Rp856,9 miliar pada 2011. Memang, hal tersebut cukup wajar karena penentuan besar kecilnya dana BLM tergantung dari jumlah penduduk dan jumlah penduduk miskin di suatu wilayah.

Sampai 2011, PNPM Perkotaan telah mencakup sekitar 1.153 kecamatan yang tersebar pada seluruh provinsi di Indonesia. Penyerabaran jumlah

kecamatan tersebut tumbuh hingga 30,28 persen dari tahun sebelumnya. Sementara itu, jumlah dana PNPM Perkotaan pada 2011 naik sekitar 19,22 persen (yoy) menjadi Rp1,61 triliun. Menurut menyebarannya, PNPM pada 2010 terkonsentrasi di Jawa, mencakup 410 kecamatan dengan distribusi dana mencapai Rp732 miliar. Pada tempat kedua adalah Sumatera dengan jumlah kecamatan mencapai 270 kecamatan dengan dana sekitar Rp364 miliar.

Berbeda dengan 2010, sebagian besar jumlah dana PNPM-Perkotaan pada 2011 menyebar di Sumatera, mencapai 59,35 persen dari total dana Rp1,61 triliun, tetapi jumlah kecamatan penyerap dana tersebut tidak bertambah. Pada tahun yang sama, Jawa menyerap sekitar Rp514 miliar dana PNPM Perkotaan atau mencakup 31,84 persen dari total dana PNPM Perkotaan selama 2011. Pada tempat ketiga dan keempat diisi oleh Sulawesi dan Kalimantan, dengan pangsa dana 3,30 persen dan 2,31 persen dari total dana PNPM Perkotaan 2011. Pada bagian lain, Bali + Nusa Tenggara serta Maluku + Papua masing-masing memeroleh dana Rp37,28 miliar dan Rp14,37 miliar (Tabel 4.4).

Tabel 4.2.2 Perkembangan Dana BLM Perkotaan Tahun 2010 dan 2011 Serta Distribusinya

	2010				2011				Pertumbuhan	
	Kec	BLM (Rp Miliar)	*Share* Kec	*Share* BLM	Kec	BLM (Rp Miliar)	*Share* Kec	*Share* BLM	Kec	BLM
Sumatera	270	364.283	23,42	26,86	270	959.771	23,42	59,35	0,00	163,47
Jawa	410	732.380	35,56	53,99	629	514.919	54,55	31,84	53,41	-29,69
Bali + Nusa Tenggara	37	63.542	3,21	4,68	46	37.288	3,99	2,31	24,32	-41,32
Kalimantan	56	63.580	4,86	4,69	64	53.380	5,55	3,30	14,29	-16,04
Sulawesi	77	90.340	6,68	6,66	109	37.459	9,45	2,32	41,56	-58,54
Maluku + Papua	35	42.300	3,04	3,12	35	14.378	3,04	0,89	0,00	-66,01
Total	885	1.356.425	-	-	1.153	1.617.195	-	-	30,28	19,22

Sumber : Diolah dari PNPM Perkotaan, 2011

Dari sisi pertumbuhan jumlah kecamatan, dapat disebutkan bahwa pertumbuhan distribusi penyerap dana PNPM Mandiri tertinggi berada di Jawa. Jumlah kecamatan yang memeroleh dana PNPM Perkotaan pada 2011 tumbuh hingga 53,41 persen (yoy) disusul Sulawesi dan Bali + Nusa Tenggara masing-masing 41,56 persen (yoy) dan 24,32 persen (yoy). Menurut besaran dana, hanya

Sumatera yang mengalami pertumbuhan dana PNPM Perkotaan, mencapai 163,47 persen (yoy). Alokasi dana untuk PNPM Perkotaan di Jawa menyusut 29,69 persen (yoy), Bali + Nusa Tenggara menyusut 41,32 persen (yoy), Kalimantan menurun 16,04 persen (yoy) sedangkan Sulawesi, Maluku + Papua masing-masing menyusut 58,54 persen (yoy) dan 66,01 persen (yoy).

Data PNPM menunjukkan bahwa hingga 2011, jumlah RTM di Indonesia mencapai 9,75 juta. Sebagian besar berada di Jawa, mencapai 5,29 juta atau 54,27 persen dari total rumah tangga miskin yang ada di Indonesia. Sementara jumlah rumah tangga miskin di Sumatera mencapai 2,02 juta atau 20,79 persen; Bali + Nusa Tenggara mencapai 746 ribu (7,65 persen); Sulawesi 733 ribu (7,51 persen); Maluku + Papua 537 ribu (5,51 persen) dan Kalimantan 415 ribu (4,26 persen) [Grafik 4.3].

Distribusi rumah tangga miskin dan distribusi BLM serta jumlah dan persentase penduduk miskin menurut provinsi di tampilkan pada Tabel 4.5.

Grafik 4.2.2 Distribusi Rumah Tangga Miskin di Indonesia dan BLM

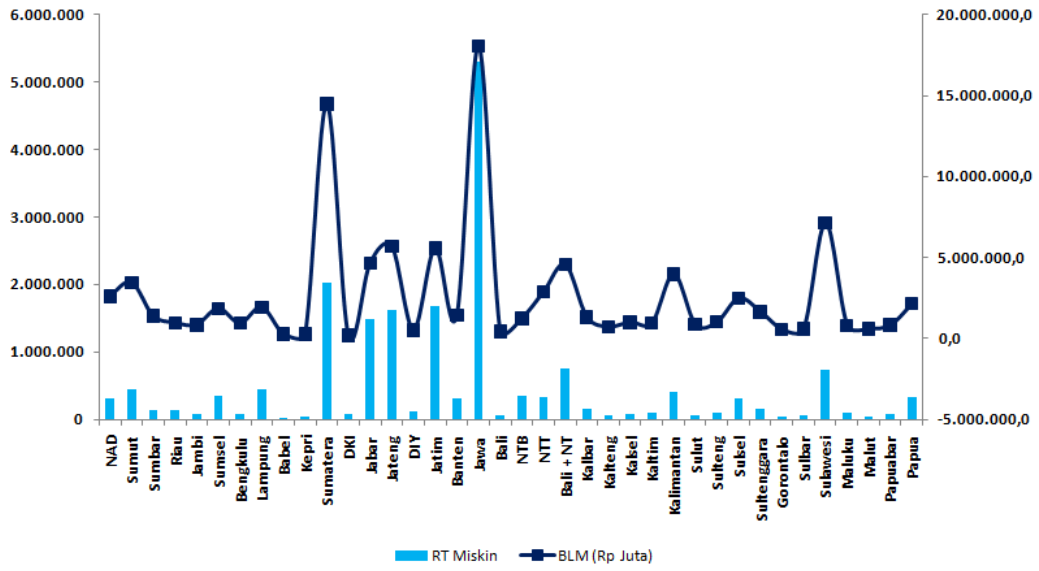

Sumber:www.simpadu-pnpm.bappenas.go.id

Tabel 4.2.3 Sebaran Rumah Tangga Miskin, Besaran BLM, dan Jumlah serta Persentase Penduduk Miskin 2010

	RT Miskin	BLM (Rp Juta)	Jumlah Penduduk Miskin (000)			% Penduduk Miskin (%)		
			Kota	Desa	K+D	Kota	Desa	Kota+Desa
NAD	302.582	2.610.715,0	173,4	688,5	861,9	14,65	23,54	20,98
Sumut	447.897	3.453.883,0	689,0	801,9	1.490,9	11,34	11,29	11,31
Sumbar	143.458	1.380.622,0	106,2	323,8	430,0	6,84	10,88	9,5
Riau	132.990	960.955,0	208,9	291,3	500,3	7,17	10,15	8,65
Jambi	72.199	835.430,0	110,8	130,8	241,6	11,8	6,67	8,34
Sumsel	351.721	1.849.577,0	471,2	654,5	1.125,7	16,73	14,67	15,47
Bengkulu	80.236	932.524,3	117,2	207,7	324,9	18,75	18,05	18,3
Lampung	449.680	1.921.021,4	301,7	1.178,2	1.479,9	14,3	20,65	18,94
Babel	12.980	275.362,0	21,9	45,9	67,8	4,39	8,45	6,51
Kepri	34.954	262.082,0	67,1	62,6	129,7	7,87	8,24	8,05
Sumatera	**2.028.697,**	**14.482.171,7**	**2.267,4**	**4.385,2**	**6.652,7**			
DKI	79.972	192.814,0	312,2	-	312,2	3,48	-	3,48
Jabar	1.493.469	4.657.585,0	2.350,5	2.423,2	4.773,7	9,43	13,88	11,27
Jateng	1.614.965	5.698.428,0	2.258,9	3.110,2	5.369,2	14,33	18,66	16,56
DIY	124.805	521.415,0	308,4	268,9	577,3	13,98	21,95	16,83
Jatim	1.672.633	5.581.070,0	1.873,5	3.655,8	5.529,3	10,58	19,74	15,26
Banten	309.338	1.430.051,0	318,3	439,9	758,2	4,99	10,44	7,16
Jawa	**5.295.182,0**	**18.081.363,0**	**7.421,8**	**9.898,0**	**17.319,9**			
Bali	57.398	435.620,0	83,6	91,3	174,9	4,04	6,02	4,88
NTB	352.172	1.244.385,0	552,6	456,7	1.009,4	28,16	16,78	21,55
NTT	336.480	2.871.839,7	107,4	906,7	1.014,1	13,57	25,1	23,03
Bali + NT	**746.050,0**	**4.551.844,7**	**743,6**	**1.454,7**	**2.198,4**			
Kalbar	163.260	1.308.973,9	83,4	345,3	428,8	6,31	10,06	9,02
Kalteng	64.051	709.926,4	33,2	131,0	164,2	4,03	8,19	6,77
Kalsel	86.615	994.023,0	65,8	116,2	182,0	4,54	5,69	5,21
Kaltim	101.667	959.262,0	79,2	163,8	243,0	4,02	13,66	7,66
Kalimantan	**415.593,0**	**3.972.185,3**	**261,6**	**756,3**	**1.018,0**			
Sulut	69.256	866.904,0	76,4	130,3	206,7	7,75	10,14	9,1
Sulteng	92.694	1.006.570,5	54,2	420,8	475,0	9,82	20,26	18,07
Sulsel	315.637	2.475.287,0	119,2	794,2	913,4	4,7	14,88	11,6
Sultenggara	150.098	1.646.695,0	22,2	378,5	400,7	4,1	20,92	17,05
Gorontalo	47.943	540.220,0	17,8	192,0	209,9	6,29	30,89	23,19
Sulbar	57.437	601.360,0	33,7	107,6	141,3	9,7	15,52	13,58
Sulawesi	**733.065,0**	**7.137.036,5**	**323,5**	**2.023,4**	**2.347,0**			
Maluku	106.068	811.006,7	36,3	342,3	378,6	10,2	33,94	27,74
Malut	33.513	587.776,6	7,6	83,4	91,1	2,66	12,28	9,42

	RT Miskin	BLM (Rp Juta)	Jumlah Penduduk Miskin (000)			% Penduduk Miskin (%)		
			Kota	Desa	K+D	Kota	Desa	Kota+Desa
Papuabar	77.688	817.532,0	9,6	246,7	256,3	5,73	43,48	34,88
Papua	320.641	2.140.867,0	26,2	735,4	761,6	5,55	46,02	36,8
Maluku + Papua	**537.910,0**	**4.357.182,3**	**79,7**	**1.407,8**	**1.487,6**			
Indonesia	9.756.497	52.581.784	**11.097,8**	**19.925,6**	**31.023,4**	**9,87**	**16,56**	**13,33**

Sumber: Diolah dari www.simpadu-pnpm.bappenas.go.id dan BPS, 2011

Menurut distribusi sektoral, sedikitnya terdapat sembilan sektor yang menjadi fokus pendanaan PNPM yaitu, pendidikan, akses/transportasi, energi, sosial, kesehatan, lingkungan, pertanian, ekonomi, dan lain-lain. Porsi terbesar dari alokasi PNPM berada pada sektor akses/transportasi mencapai Rp14,19 triliun (49,10 persen dari total dana); disusul sektor kesehatan sebesar Rp4,64 triliun (16,06 persen), dan sektor pendidikan Rp4,06 triliun (14,04 persen). Sementara itu sektor ekonomi, pertanian dan sosial masing-masing memeroleh alokasi dana PNPM sekitar Rp3,82 triliun (13,23 persen); Rp931 miliar (3,22 persen); dan Rp927 miliar (3,21 persen).

Tiga sektor penerimaan dana PNPM terkecil adalah sektor energi (Rp270 miliar atau 0,93 persen); sektor lingkungan (Rp55 miliar atau 0,19 persen) dan sektor lain-lain (Rp67 juta) [Bagan 4.1.].

Bagan 4.2.3 Distribusi PNPM Menurut Sektor

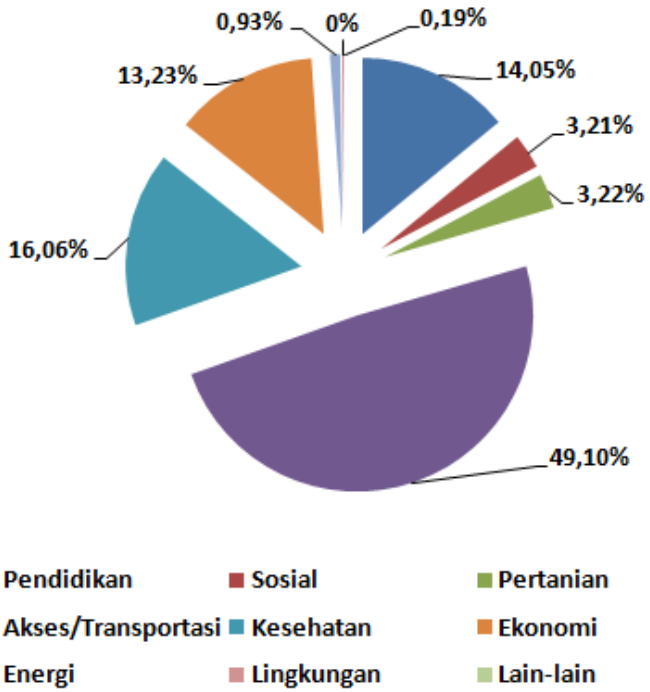

Sumber: Diolah dari www.simpadu-pnpm.bappenas.go.id

Beberapa alokasi dana PNPM pada sektor kesehatan berada pada pembiayaan kesehatan masyarakat, mencapai 47,13 persen disusul dengan pengadaan air bersih sebanyak 26,09 persen. Sementara pengadaan sanitasi dan rumah sehat masing-masing mencakup 17,2 persen dan 8,22 persen dari total dana PNPM untuk sektor kesehatan. Dana untuk kesehatan lain-lain dan alokasi dana PNPM untuk kegiatan kesehatan lainnya masing-masing mencapai 1,17 persen dan 0,19 persen dari total alokasi dana PNPM.

Pada sektor ekonomi, sebagian besar dana PNPM tersebar pada dana bergulir, mencapai 83,36 persen disusul dengan bantuan langsug dan pengadaan sarana perdagangan masing-masing 12,33 persen dan 3,87 persen. Sementara untuk peningkatan SDM pada sektor ekonomi menyita sekitar 0,42 persen dari dana PNPM pada sektor ekonomi. Sisanya (0,02 persen) dialokasikan untuk kegiatan lainnya yang termasuk dalam cakupan sektor ekonomi.

Lain hal dengan sektor transportasi, alokasi terbesar berada pada subsektor jalan, mencapai 71,63 persen, disusul alat transportasi dan pembangunan tambatan perahu/dermaga/terminal masing-masing 21,36 persen dan 6,35 persen. Pembangunan jembatan/gelagar dan penunjang jalan sedikit menyita sekitar 0,65 persen dan 0,01 persen dari total alokasi anggaran PNPM untuk sektor transportasi. Alokasi dana PNPM pada sektor pertanian mencakup tiga bagian penting yaitu irigasi, pertanian lain-lain, dan prasarana pertanian. Dana untuk irigasi menyita dana tertinggi, mencapai 98,73 persen dari total dana PNPM untuk sektor pertanian. Dua bagian lainnya menyedot dana 1,16 persen dan 0,11 persen dari total dana PNPM pada sektor transportasi.

Pada sektor sosial dan lingkungan, alokasi tertinggi berada pada pengadaan sarana sosial dan perbaikan danau. Keduanya menyita sekitar 72,37 persen dan 89,6 persen dari total dana PNPM pada sektor sosial dan sektor lingkungan. Data PNPM pada sektor energi secara keseluruhan dialokasikan untuk pengadaan listrik mencapai Rp270 miliar sementara pada sektor pendidikan sebesar 49,89 persen disalurkan pada perbaikan dan pembangunan gedung sekolah dari total dana PNPM pada sektor pendidikan. Alokasi lainnya seperti pengadaan media ajar, bantuan pendidikan, dan pendidikan lain-lain masing-masing 26,16 persen; 15,78 persen; dan 8,17 persen dari total alokasi dana PNPM pada sektor pendidikan.

4.3. Hasil Kunjungan Daerah

4.3.1. Kota Semarang

Aspek Geografi dan Topografi

Luas dan batas wilayah, Kota Semarang dengan luas wilayah 373,70 Km2. Secara administratif Kota Semarang terbagi menjadi 16 Kecamatan dan 177 Kelurahan. Dari 16 Kecamatan yang ada, terdapat 2 Kecamatan yang mempunyai wilayah terluas yaitu Kecamatan Mijen, dengan luas wilayah 57,55 Km2 dan Kecamatan Gunungpati, dengan luas wilayah 54,11 Km2. Kedua Kecamatan tersebut terletak

di bagian selatan yang merupakan wilayah perbukitan yang sebagian besar wilayahnya masih memiliki potensi pertanian dan perkebunan. Sedangkan kecamatan yang mempunyai luas terkecil adalah Kecamatan Semarang Selatan, dengan luas wilayah 5,93 Km2 diikuti oleh Kecamatan Semarang Tengah, dengan luas wilayah 6,14 Km2 .

Batas wilayah administratif Kota Semarang sebelah barat adalah Kabupaten Kendal, sebelah timur dengan Kabupaten Demak, sebelah selatan dengan Kabupaten Semarang dan sebelah utara dibatasi oleh Laut Jawa dengan panjang garis pantai mencapai 13,6 kilometer.

Letak dan kondisi geografis, Kota Semarang memiliki posisi astronomi di antara garis 6050' – 7o10' Lintang Selatan dan garis 109035' – 110050' Bujur Timur. Kota Semarang memiliki posisi geostrategis karena berada pada jalur lalu lintas ekonomi pulau Jawa, dan merupakan koridor pembangunan Jawa Tengah yang terdiri dari empat simpul pintu gerbang yakni koridor pantai Utara; koridor Selatan ke arah kota-kota dinamis seperti Kabupaten Magelang, Surakarta yang dikenal dengan koridor Merapi-Merbabu, koridor Timur ke arah Kabupaten Demak/ Grobogan; dan Barat menuju Kabupaten Kendal. Dalam perkembangan dan pertumbuhan Jawa Tengah, Semarang sangat berperan terutama dengan adanya pelabuhan, jaringan transport darat (jalur kereta api dan jalan) serta transport udara yang merupakan potensi bagi simpul transportasi Regional Jawa Tengah dan Kota Transit Regional Jawa Tengah. Posisi lain yang tak kalah pentingnya adalah kekuatan hubungan dengan luar Jawa, secara langsung sebagai pusat wilayah nasional bagian tengah.

Secara topografis Kota Semarang terdiri dari daerah perbukitan, dataran rendah dan daerah pantai, dengan demikian topografi Kota Semarang menunjukkan adanya berbagai kemiringan dan tonjolan. Daerah pantai 65,22% wilayahnya adalah dataran dengan kemiringan 25% dan 37,78 % merupakan daerah perbukitan dengan kemiringan 15-40%. Kondisi lereng tanah Kota Semarang dibagi menjadi 4 jenis kelerengan yaitu Lereng I (0-2%) meliputi Kecamatan Genuk,

Pedurungan, Gayamsari, Semarang Timur, Semarang Utara dan Tugu, serta sebagian wilayah Kecamatan Tembalang, Banyumanik dan Mijen. Lereng II (2-5%) meliputi Kecamatan Semarang Barat, Semarang Selatan, Candisari, Gajahmungkur, Gunungpati dan Ngaliyan. Lereng III (15-40%) meliputi wilayah di sekitar Kaligarang dan Kali Kreo (Kecamatan Gunungpati), sebagian wilayah kecamatan Mijen (daerah Wonoplumbon) dan sebagian wilayah Kecamatan Banyumanik, serta Kecamatan Candisari. Sedangkan lereng IV (> 50%) meliputi sebagian wilayah Kecamatan Banyumanik (sebelah tenggara), dan sebagian wilayah Kecamatan Gunungpati, terutama disekitar Kali Garang dan Kali Kripik.

Kota Bawah yang sebagian besar tanahnya terdiri dari pasir dan lempung. Pemanfaatan lahan lebih banyak digunakan untuk jalan, permukiman atau perumahan, bangunan, halaman, kawasan industri, tambak, empang dan persawahan. Kota Bawah sebagai pusat kegiatan pemerintahan, perdagangan, perindustrian, pendidikan dan kebudayaan, angkutan atau transportasi dan perikanan. Berbeda dengan daerah perbukitan atau Kota Atas yang struktur geologinya sebagian besar terdiri dari batuan beku. Wilayah Kota Semarang berada pada ketinggian antara 0 sampai dengan 348,00 meter dpl (di atas permukaan air laut). Secara topografi terdiri atas daerah pantai, dataran rendah dan perbukitan, sehingga memiliki wilayah yang disebut sebagai kota bawah dan kota atas. Pada daerah perbukitan mempunyai ketinggian 90,56 - 348 mdpl yang diwakili oleh titik tinggi yang berlokasi di Jatingaleh dan Gombel, Semarang Selatan, Tugu, Mijen, dan Gunungpati, dan di dataran rendah mempunyai ketinggian 0,75 mdpl.

Aspek Demografi

Secara Demografi, berdasarkan data statistik Kota Semarang penduduk Kota Semarang periode tahun 2005-2009 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 1,4% per tahun. Pada tahun 2005 adalah 1.419.478 jiwa, sedangkan pada tahun 2009 sebesar 1.506.924 jiwa, yang terdiri dari 748.515 penduduk laki-laki, dan 758.409 penduduk perempuan. Peningkatan jumlah penduduk tersebut dipengaruhi oleh jumlah kelahiran, kematian dan migrasi. Pada tahun 2005

jumlah kelahiran sebanyak 19.504 jiwa, jumlah kematian sebanyak 8.172 jiwa, penduduk yang datang sebanyak 38.910 jiwa dan penduduk yang pergi sebanyak 29.107 jiwa. Besarnya penduduk yang datang ke Kota Semarang disebabkan daya tarik kota Semarang sebagai kota perdagangan, jasa, industri dan pendidikan.

Dari data yang ada dapat diketahui bahwa penduduk yang datang ke Kota Semarang dan penduduk yang lahir setiap tahunnya lebih besar dari pada penduduk yang pindah dan penduduk yang mati, hal tersebut menggambarkan bahwa peningkatan penduduk Kota Semarang disebabkan oleh penduduk yang datang dan lahir dengan proporsi rata-rata 60,04% per tahun dibanding penduduk pindah dan penduduk yang mati. Penduduk Kota Semarang dilihat dari kelompok umur sebanyak 912.362 jiwa atau 73,96% merupakan penduduk usia produktif (umur 15 – 65 tahun) dan 26,04% merupakan penduduk tidak produktif (umur 0-14 tahun dan diatas 65 tahun).

Komposisi penduduk kota Semarang ditinjau dari aspek pendidikan (di atas umur 5 tahun) adalah telah tamat SD/MI sebesar 22,86% ; telah tamat SLTA sebesar 21,10% ; belum tamat SD sebesar 20,38% ;telah tamat SLTP sebesar 20,28% ; tidak/belum pernah sekolah sebesar 6,54%, telah tamat DIV/S1/S2 sebesar 4,51% dan telah tamat DI/DII/DIII sebesar 4,35%

Sedangkan komposisi penduduk berdasarkan mata pencaharian di Kota Semarang berturut-turut buruh Industri dengan persentase sebesar 24,76%, PNS/ABRI sebesar 14,11%, Lainnya sebesar 12,24%, Pedagang sebesar 11,92%, Buruh Bangunan 1,80%, Pengusaha sebesar 8,52%, Pensiunan sebesar 5,33%, Petani sebesar 4,27%, Angkutan sebesar 3,60%, Buruh tani sebesar 3,05%, dan Nelayan sebesar 0,40 %. Hal ini menggambarkan bahwa aktivitas penduduk Kota Semarang bergerak pada sektor perdagangan dan jasa.

Aspek Kesejahteraan asyarakat

Kinerja pembangunan pada aspek kesejahteraan masyarakat merupakan gambaran dan hasil dari pelaksanaan pembangunan selama periode tertentu terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat yang mencakup kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, seni budaya dan olahraga. Hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan pada aspek kesejahteraan masyarakat selama periode 2005-2009 adalah sebagai berikut :

Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi.

Kinerja kesejahteraan dan pemerataan ekonomi Kota Semarang selama periode tahun 2005-2009 dapat dilihat dari indikator pertumbuhan PDRB, laju inflasi, PDRB per kapita, dan angka kriminalitas yang tertangani. Perkembangan kinerja pembangunan pada kesejahteraan dan pemerataan ekonomi adalah sebagai berikut:

a. Pertumbuhan PDRB

Pertumbuhan PDRB merupakan indikator untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro yang mencakup tingkat pertumbuhan sektor-sektor ekonomi dan tingkat pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah. Laju Pertumbuhan PDRB Kota Semarang atas dasar harga berlaku selama periode 2005-2009 mengalami pertumbuhan yang meningkat. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku pada tahun 2005 sebesar Rp. 23.208.244,89 juta rupiah sampai dengan tahun 2009 mencapai sebesar Rp. 38.459.815,06 juta rupiah. Sedangkan untuk PDRB Atas Dasar Harga Konstan pada tahun 2005 sebesar Rp 16.194.264,61 juta rupiah dan meningkat menjadi Rp 20.180.577,95 juta rupiah di tahun 2009.

Dari data-data yang ada, kontribusi sektor usaha terbesar terhadap PDRB Kota Semarang adalah Sektor Usaha Perdagangan, Hotel dan Restoran diikuti kemudian oleh Sektor Usaha Industri Pengolahan dan Sektor Usaha Bangunan. Pada tahun 2009 konstribusi masing-masing sektor usaha tersebut adalah sebagai berikut : Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar 29,86 %, industri pengolahan sebesar 24,52%, dan sektor bangunan sebesar 19,27%. Hal tersebut

menggambarkan bahwa aktivitas ekonomi masyarakat Kota Semarang didominasi oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor industri pengolahan dan sektor bangunan. Peningkatan Laju Pertumbuhan PDRB berimplikasi terhadap kondisi perekonomian Kota Semarang secara makro yang ditunjukan dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE). Dimana selama periode 2005-2009 mengalami pertumbuhan yang positif.

Pada tahun 2005 tercatat sebesar 5,14%, kemudian meningkat sebesar 5,71 %, pada tahun 2006, 5,98 % pada tahun 2007, dan 6,03 % pada tahun 2008. Sedangkan pada tahun 2009, pertumbuhan ekonomi kota Semarang tercatat sebesar 5,47 %. Pertumbuhan ekonomi Kota Semarang terjadi penurunan pada tahun 2009 sebesar 0,56 % dari 6,03 % pada tahun 2008 menjadi 5,47 % pada tahun 2009. Penurunan ini lebih dipengaruhi adanya kondisi perekonomian global seperti kebijakan pasar bebas (*Asean-China Free Trade Area/ACFTA*), kenaikan BBM dan TDL.

b. Laju Inflasi

Laju inflasi merupakan ukuran yang dapat menggambarkan kenaikan/penurunan harga dari sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Laju inflasi Kota Semarang selama periode tahun 2005-2009 mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Pada tahun 2005 sebesar 16,46 %, tahun 2006 sebesar 6,08 %, tahun 2007 mencapai 6,75 %, tahun 2008 sebesar 10,34 % dan tahun 2009 sebesar 3,19 %. Besaran laju inflasi yang terjadi lebih diakibatkan pada permintaan masyarakat akan bahan kebutuhan pokok.

c. PDRB Perkapita

Peningkatan Laju Pertumbuhan PDRB, diikuti dengan kenaikan pendapatan per kapita. Selama periode tahun 2005-2009 PDRB Perkapita Kota Semarang mengalami pertumbuhan yang positif. PDRB Perkapita atas dasar harga berlaku pada tahun 2005 sebesar Rp. 14.947.472,59 meningkat pada tahun 2006 menjadi sebesar Rp.17.067.350,89 dan pada tahun 2007 sebesar Rp.19.394.727,40

kemudian meningkat lagi pada tahun 2008 menjadi sebesar Rp.21.352.860,09 serta pada tahun 2009 menjadi sebesar Rp.23.889.579,87. PDRB per kapita atas dasar harga konstan tahun 2000 dari tahun ke tahun juga menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2005 sebesar Rp. 10.534.628,92,-, pada tahun 2006 sebesar Rp.11.045.072,76,-, pada tahun 2007 sebesar Rp.11.591.578,22, pada tahun 2008 sebesar Rp.11.897.251,91, dan pada tahun 2009 sebesar Rp. 12.338.639,96.

d. Indek Pembangunan Manusia (IPM)

IPM merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat upaya dan kinerja pembangunan dengan dimensi yang lebih luas karena memperlihatkan kualitas penduduk dalam hal kelangsungan hidup, intelektualias dan standar hidup layak. IPM disusun dari tiga komponen yaitu lamanya hidup, yang diukur dengan harapan hidup pada saat lahir ; tingkat pendidikan, diukur dengan kombinasi antara melek huruf pada penduduk dewasa dan rata-rata lama sekolah ; serta tingkat kehidupan yang layak dengan ukuran pengeluaran perkapita (*purchasing power parity*). Pada tahun 2009 IPM Kota Semarang telah mencapai skor 76,90, angka tersebut menempati urutan kedua dibawah Kota Surakarta, namun masih jauh diatas angka rata-rata Provinsi Jawa Tengah sebesar 72,10.

Fokus Kesejahteraan Sosial

Pembangunan pada fokus kejahteraan sosial meliputi indikator angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi murni, angka kelangsungan hidup bayi, angka usia harapan hidup, persentase penduduk yang memiliki lahan, dan rasio penduduk yang bekerja. Kinerja pembangunan kesejahteraan sosial Kota Semarang periode 2005-2009 pada masing-masing indikator sebagai berikut :

a. Pendidikan

Pembangunan pendidikan pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sasarannya adalah terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas melalui peningkatan mutu pendidikan, perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi semua masyarakat, tercapainya efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan, serta tercukupinya sarana dan prasarana pendidikan. Beberapa keberhasilan pembangunan bidang pendidikan dapat dilihat dari Angka Melek Huruf (AMH), Rata-rata Lama Sekolah, Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Pendidikan yang ditamatkan. AMH adalah persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin. AMH tahun 2005 sebesar 95,10 %, tahun 2006 sebesar 95,85 %, tahun 2007 sebesar 95,54 %, tahun 2008 sebesar 99,30 % dan sampai dengan tahun 2009 angka melek huruf sebesar 99,47 %. Angka pendidikan yang ditamatkan pada seluruh jenjang pendidikan baik SD, SLTP dan SLTA selama 5 tahun menunjukkan peningkatan dari 90,97% tahun 2005 menjadi 96,51%.

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Pada tahun 2009 APK SD/MI mencapai 105,27%, SMP/MTs 114,19%, sedangkan SMA/SMK/MA mencapai 116,96 %. Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. Capaian APM SD/MI pada tahun 2009 sebesar 89,68 %, SMP/MTs 79,01 %, SMA/SMK/MA sebesar 79,97 %. Capaian APK dan APM pada masing-masing jenjang pendidikan telah berada di atas rata-rata APK/APM Jawa Tengah kecuali untuk SD/MI. Belum optimalnya angka capaian APK/APM disebabkan oleh mahalnya biaya pendidikan, walaupun dukungan anggaran untuk pendidikan sudah melebihi 20 % dari total anggaran APBD. Oleh karena itu diperlukan upaya pengalokasian anggaran pendidikan yang tepat agar pendidikan menjadi murah namun tetap berkualitas.

b. Kesehatan

Selama kurun waktu 5 tahun (2005-2009) kondisi pembangunan Kesehatan menunjukkan perubahan yang fluktuatif, hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator bidang kesehatan. Angka kelangsungan hidup bayi selama 5 tahun menurun dari 98,08 % pada tahun 2005 menjadi 81,40 % tahun 2009. Demikian pula Angka persentase gizi buruk mengalami peningkatan dari tahun 2005 sebesar 0,019 % menjadi 0,04 % tahun 2009. Penurunan angka kelangsungan hidup dan peningkatan angka gizi buruk lebih disebabkan adanya penyakit bawaan dan wabah penyakit yang disebabkan oleh vektor binatang seperti Demam Berdarah. Upaya pengembangan paradigma hidup sehat harus menjadi perhatian utama agar wabah penyakit menular tidak terulang. Namun demikian secara keseluruhan Angka Usia harapan Hidup Kota Semarang di Kota Semarang sebesar 72,1, jauh melebihi angka harapan hidup nasional sebesar 69,0 tahun.

c. Kemiskinan

Selama kurun waktu 5 tahun (2005-2009) jumlah penduduk miskin mengalami pertumbuhan yang fluktuatif, jumlah penduduk miskin tahun 2005- 2008 mengalami peningkatan , tahun 2005 sebanyak 94.246 jiwa, tahun 2006 sebanyak 246.448 jiwa, tahun 2007 sebanyak 306.700 jiwa dan tahun 2008 sebanyak 491.747 jiwa, namun pada tahun 2009 mengalami penurunan menjadi sebesar 398.009 jiwa. Begitu pula ratio penduduk miskin terhadap jumlah penduduk kota Semarang semakin meningkat selama 4 tahun terakhir (2005-2008), tahun 2007 sebesar 6,64%, tahun 2006 sebesar 17,19%, tahun 2007 sebesar 21,08%, tahun 2008 sebanyak 33,19%, namun tahun 2009 menurun menjadi sebesar 26,41%. Penurunan jumlah dan rasio penduduk miskin sebesar 6,78% disebabkan berbagai program penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang semakin menyentuh masyarakat miskin (tepat sasaran). Ketepatan tersebut didukung oleh adanya identifikasi dan verifikasi berdasarkan indikator dan kriteria kemiskinan yang disusun sesuai dengan kondisi lokalitas daerah yang semakin mendekati kenyataan. Kedepan diperlukan upaya untuk melakukan

unifikasi data kemiskinan agar proses percepatan penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan dengan tepat. Optimalisasi peran masayarakat untuk turut serta dalam menyalurkan program *Corpotate Social Responsibility* (CSR) perlu didorong terus menerus.

d. Kepemilikan tanah

Berdasarkan sumber dari Kantor Pertanahan Kota Semarang tahun 2010, persentase luas lahan bersertifikat yang tercatat di Kota Semarang mencapai angka rasio 72,8 %, sedangkan untuk rasio kepemilikan tanah mencapai 40,30. Dilihat dari jumlah kepemilikan tanah yang mempunyai sertifikat, menggambarkan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya tertib administrasi pertanahan yang berarti kepemilikan sertifikat tanah sebagai legalitas atas tanah yang dimiliki semakin menjadi penting.

e. Kesempatan Kerja

Angka kesempatan kerja dapat dihitung dari jumlah penduduk yang bekerja dibanding dengan angkatan kerja dalam satu wilayah. Rasio penduduk yang bekerja mengalami peningkatan, tahun 2005 sebesar 64,32 %, tahun 2006 sebesar 64,38%, tahun 2007 sebesar 88,61%, tahun 2008 sebesar 88,51%, namun pada tahun 2009 mengalami penurunan sebesar 7,70% atau menjadi sebesar 81,44%. Penurunan ratio penduduk yang bekerja lebih diakibatkan karena meningkatnya angkatan kerja yang tidak seimbang dengan pertumbuhan lapangan kerja. Oleh karena itu diperlukan upaya perluasan lapangan kerja sebagai upaya mengatasi pengangguran.

Gambaran Kegiatan Ekonomi Bergulir Di Upk/Bkm Kota Semarang

Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dilaksanakan sejak tahun 1999 sebagai suatu upaya pemerintah untuk membangun kemandirian masyarakat dan pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan. Program ini sangat strategis karena menyiapkan landasan kemandirian masyarakat berupa lembaga kepemimpinan

masyarakat yang representatif, mengakar dan kondusif bagi perkembangan modal sosial *(social capital)* masyarakat di masa mendatang serta menyiapkan program masyarakat jangka menengah dalam penanggulangan kemiskinan yang menjadi pengikat dalam kemitraan masyarakat dengan pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat.

Penganggulangan kemiskinan dilakukan dengan memberdayakan masyarakat melalui tiga jenis kegiatan pokok yaitu Infrastruktur, Sosial dan Ekonomi yang dikenal dengan Tridaya. Dalam kegiatan ekonomi, diwujudkan dengan kegiatan Pinjaman Bergulir, yaitu pemberian pinjaman dalam skala mikro kepada masyarakat miskin di wilayah kelurahan atau desa dimana LKM/UPK berada dengan ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan. Pedoman ini hanya mengatur ketentuan pokok untuk pelaksanaan kegiatan Pinjaman Bergulir, namun keputusan untuk melaksanakannya diserahkan sepenuhnya kepada warga masyarakat setempat.

Beberapa pertimbangan untuk melanjutkan pelaksanaan kegiatan pinjaman bergulir dalam PNPM Mandiri Perkotaan antara lain :

a. Tersedianya akses dan jasa layanan keuangan yang berkelanjutan telah terbukti merupakan salah satu alat efektif untuk membantu rumah tangga miskin meningkatkan pendapatan dan kekayaannya

b. Akses rumah tangga miskin ke jasa layanan keuangan formal masih sangat rendah. Sekitar 29 juta rumah tangga miskin masih belum mendapat akses ke jasa layanan keuangan formal. (*sumber Johnston dan Holloch)*

c. Pinjaman bergulir PNPM Mandiri Perkotaan memiliki peluang dapat menjangkau sekitar 2,5 juta rumah tangga miskin yang sama sekali belum menerima akses ke lembaga keuangan

d. Permintaan pinjaman bergulir pada rencana pembangunan masyarakat masih tinggi

e. Pemutusan pendampingan yang telah berjalan selama ini bila tanpa disertai kinerja yang memadai akan merusak budaya meminjam dan jaminan sosial yang ada di masyarakat

Pelaksanaan kegiatan Pinjaman Bergulir dalam PNPM Mandiri Perkotaan bertujuan untuk menyediakan akses layanan keuangan kepada rumah tangga miskin dengan pinjaman mikro berbasis pasar untuk memperbaiki kondisi ekonomi mereka dan membelajarkan mereka dalam hal mengelola pinjaman dan menggunakannya secara benar.

Meskipun demikian, PNPM bukanlah program keuangan mikro, dan tidak akan pernah menjadi lembaga keuangan mikro. Program keuangan mikro bukan hanya pemberian pinjaman saja akan tetapi banyak jasa keuangan lainnya yang perlu disediakan. Peran PNPM hanya membangun dasar-dasar solusi yang berkelanjutan untuk jasa pinjaman dan non pinjaman di tingkat kelurahan.

PNPM Mandiri Perkotaan dijadikan momen untuk tahap konsolidasi kegiatan keuangan mikro. Oleh sebab itu, dalam tahap ini perlu diciptakan UPK yang kuat, sehat dan secara operasional terpisah dari LKM. Masyarakat sendiri harus terlibat dalam keputusan untuk menentukan masa depan UPK.

Sasaran utama pelaksanaan kegiatan pinjaman bergulir adalah rumah tangga miskin (berpendapatan rendah) di wilayah kelurahan/desa LKM/UPK berada, khususnya masyarakat miskin yang sudah diidentifikasi dalam daftar masyarakat miskin PS2.

Indikator tercapainya sasaran tersebut meliputi:

a. Peminjam berasal dari rumah tangga miskin yang telah diidentifikasi dalam PJM Pronangkis dan telah masuk dalam Daftar PS2.

b. Minimal 30% peminjam adalah perempuan

c. Para peminjam dari rumah tangga miskin tersebut telah bergabung dalam Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) khusus untuk kegiatan ini beranggotakan minimal 5 orang.

d. Akses pinjaman bagi KSM peminjam yang kinerja pengembaliannya baik terjamin keberlanjutannya baik melalui dana BLM maupun melalui dana hasil chanelling dengan kebijakan pinjaman yang jelas.

Pendekatan yang digunakan adalah dengan mengarahkan kegiatan pinjaman bergulir sebagai akses pinjaman masyarakat miskin yang saat ini belum mempunyai akses pinjaman ke lembaga keuangan lain melalui:

a. Kegiatan pinjaman bergulir dilaksanakan ditingkat kelurahan, dikelola secara profesional untuk menjaga keberlangsungan akses pinjaman bagi masyarakat miskin.

b. Transparansi atas pengelolaan dan kinerja UPK serta monitoring partisipatif oleh warga masyarakat sebagai wujud pertanggungjawaban pengelolaan dana masyarakat, lembaga/kelompok peduli dari pemerintah maupun non pemerintah.

c. Penyediaan akses pinjaman yang jumlahnya maupun tingkat bunganya hanya menarik bagi kelompok masyarakat miskin.

d. Menggunakan sistem tanggung renteng kelompok sebagai alat kontrol pengelola (UPK) maupun kelompok peminjam (KSM)

e. Meningkatkan kapasitas kewirausahaan masyarakat melalui pelatihan ekonomi rumah tangga, kewirausahaan dan pembukuan sederhana.

Beberapa prinsip dasar dalam pemberian pinjaman bergulir yang perlu mendapat perhatian dari LKM / UPK antara lain adalah:

a. Dana BLM yang dialokasikan untuk kegiatan pinjaman bergulir adalah milik masyarakat kelurahan/desa sasaran dan bukan milik perorangan;

b. Tujuan dipilihnya kegiatan pinjaman bergulir adalah dalam rangka membantu program penanggulangan kemiskinan dan oleh karenanya harus menjangkau warga masyarakat miskin sebagai kelompok sasaran utama PNPM Mandiri Perkotaan

c. Pengelolaan pinjaman bergulir berorientasi kepada proses pembelajaran untuk penciptaan peluang usaha dan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat miskin, serta kegiatan-kegiatan produktif lainnya;

d. Pengelolaan pinjaman bergulir dipisahkan antara LKM sebagai representasi dari warga masyarakat pemilik modal dengan UPK sebagai pengelola kegiatan pinjaman bergulir yang bertanggungjawab langsung kepada LKM;

e. Prosedur serta keputusan pemberian pinjaman harus mengikuti prosedur pemberian pinjaman bergulir standar yang ditetapkan

f. Manajer dan Petugas UPK harus orang yang mempunyai kemampuan dan telah memperoleh sertifikat pelatihan dasar yang diadakan oleh PNPM Mandiri Perkotaan;

g. UPK telah mempunyai sistim pembukuan yang standar dan sistim pelaporan keuangan yang memadai;

h. UPK mendapat pengawasan baik oleh LKM melalui Pengawas UPK maupun konsultan pelaksana (KMW) melalui tenaga ahli dan fasilitator, atau pihak yang ditunjuk proyek.

Gambaran Umum pelaksanaan Kegiatan Pinjaman Bergulir PNPM – MP Kota Semarang

Kegiatan PNPM – Mandiri Perkotaan di Kota Semarang saat ini telah mencakup di seluruh kelurahan yang berjumlah 177 Kelurahan, akan tetapi tidak seluruh kelurahan tersebut telah melaksanakan kegiatan pinjaman bergulir. Hal itu di karenakan lokasi / kelurahan belum sepenuhnya menerima alokasi BLM untuk kegiatan perguliran, namun demikian kelurahan tersebut telah sedemikian rupa mempersiapkan diri untuk melaksanakan kegiatan perguliran sebagai akses layanan keuangan kepada rumah tangga miskin dengan pinjaman mikro berbasis pasar untuk memperbaiki kondisi ekonomi mereka.

Kegiatan ekonomi bergulir BKM/LKM yang ada di Kota semarang dalam perkembangan yang ada di masing – masing BKM berbeda antara satu dengan yang lain, namun secara umum kegiatan dana bergulir dapat mencapai kesuksesan dengan beberapa indikator, yaitu :

1. Ketepatan sasaran dalam pemberian pinjaman

   Kegiatan ekonomi bergulir di peruntukan bagi rumah tangga miskin yang produktif, yang membutuhkan akses permodalan untuk kegiatan usaha bagi mereka yang belum mendapat kepercayaan untuk mengakses modal usaha dari lembaga keuangan formal yang ada.

2. Pemberian pinjaman berdasarkan karakter (*character-based*) bukan kepemilikan kolateral (*colateral-based*), kondisi ini merupakan praktik yang diperlukan untuk meningkatkan pendapatan peminjam yang berpendapatan rendah

3. Besaran pinjaman sangat kecil dibandingkan dengan pinjaman yang diberikan oleh lembaga keuangan formal dan tidak bersaing dengan sumber-sumber komersial lainnya

4. Keputusan kegiatan dana pinjaman bergulir (RLF) ditetapkan dan dikelola langsung oleh masyarakat

5. Indikator dana bergulir telah mencapai kategori minimal hingga memuaskan.

Gambar 4.3.1 Tingkat Modal yang ada di UPK BKM

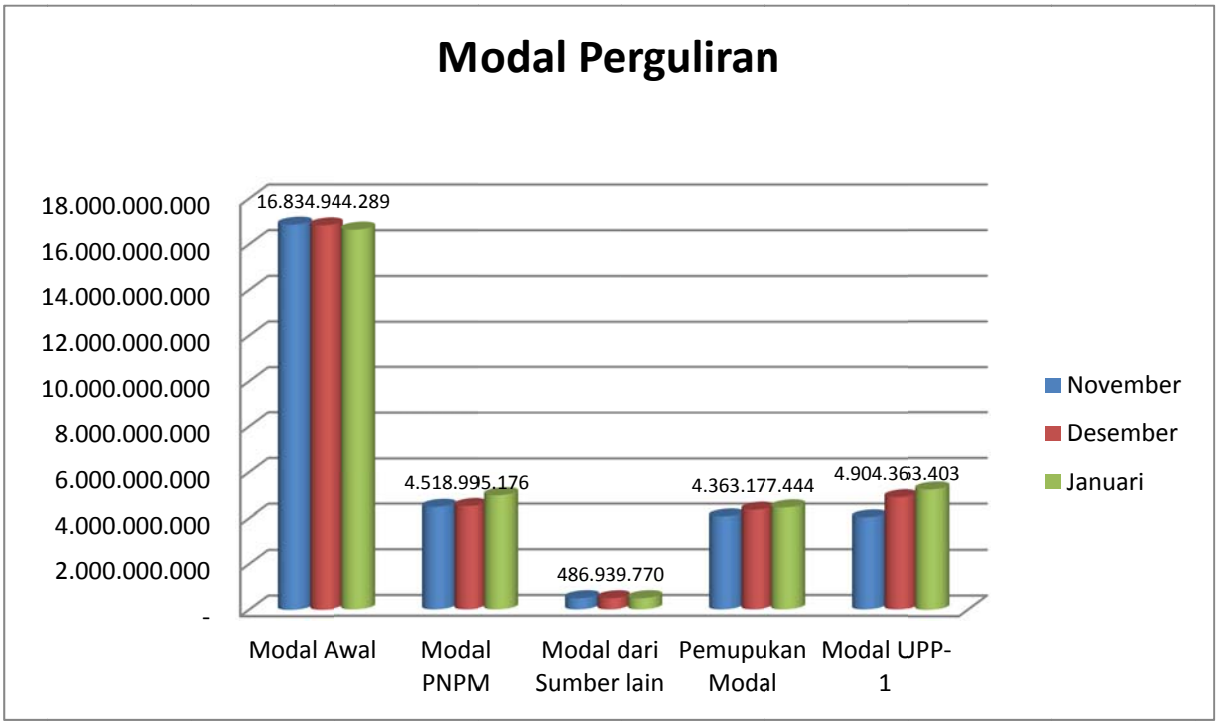

Sebagai gambaran secara makro kondisi kegiatan Ekonomi bergulir yang ada di Kota Semarang dapat kita lihat dari data yang ada :

Tabel 4.3.1 Modal Perguliran UPK – BKM Kota Semarang

Bulan	MODAL				
	Modal Awal	Modal PNPM	Modal dari Sumber lain	Pemupukan Modal	Modal UPP-1
November	16.864.125.573	4.479.432.116	486.939.770	4.061.471.607	4.020.556.695
Desember	16.834.944.289	4.518.995.176	486.939.770	4.363.177.444	4.904.363.403
Januari	16.651.585.831	4.989.799.719	486.939.770	4.458.363.413	5.245.887.270

Modal yang ada saat ini berkisar Rp. 25,3 Milyard seperti tergambar pada tabel di atas dengan rata - rata realisasi pinjaman yang ada di masyarakat sebesar Rp. 25,5 M seperti tergambar pada grafik 2 Modal perguliran tersebut cenderung mengalami peningkatan seiring dengan adanya akses Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang di gunakan untuk kegiatan simpan pinjam oleh BKM dengan rata – rata tingkat kemacetan sebesar ± Rp. 5 M,- atau kurang lebih 20%. Namun demikian di lihat dari data yang ada bahwa angka kemacetan tersebut sebagian besar banyak terjadi sebelum tahun 2005 yakni terlihat pada Modal hasil Split Account (Modal UPP-1) yaitu sebesar Rp. 5.245.887.270, akan tetapi dengan adanya sinkronisasi antar lembaga terkait diharapkan pelaksanaan kegiatan ini akan lebih baik, hal ini bisa kita lihat dengan adanya tingkat pemupukan Modal pada tutup buku tahun 2010 mencapai lebih dari Rp.1 milyar *(lihat Grafik 4)*.

Tabel 4.3.2. Posisi Piutang UPK-BKM

KET	PIUTANG					
	TOTAL	Lancar	Nunggak < 3 bln	Nunggak > 3 bln sd <6bln	Nunggak > 6 bln sd < 9bln	Nunggak > 9bln
November 10	25.134.021.727	14.329.394.657	2.762.217.628	1.267.193.939	1.128.231.024	5.646.984.479
Desember 10	25.569.035.319	14.898.415.285	2.747.752.274	1.247.491.007	1.274.705.643	5.400.671.110
Januari 11	25.134.021.727	14.329.394.657	2.762. 7.628	1.267.193.939	1.128.231.024	5.646.984.479

Grafik 4.3.2. Piutang UPK BKM

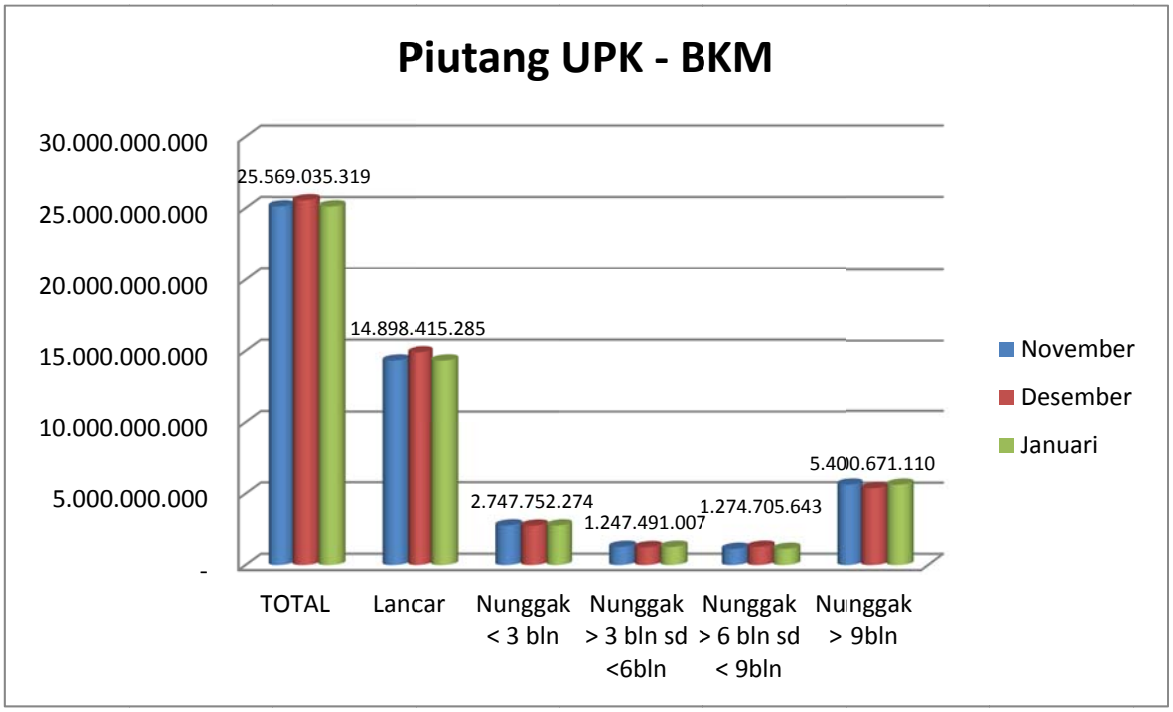

Dengan adanya kemitraan antara BKM dengan berbagai pihak termasuk dengan adanya pembinaan dari jajaran pemerintah kota maka tingkat pertumbuhan di harapkan akan lebih tinggi sehingga akan mampu menggerakan sektor riil, terutama pada perkembangan usaha mikro.

Tabel 4.3.4 Jumlah KSM Aktif Kota Semarang

Bulan	Jumlah KSM Aktif	KSM Lancar	Nunggak < 3 bln	Nunggak > 3 bln sd <6bln	Nunggak > 6 bln sd < 9bln	Nunggak > 9bln
Nov 10	10.187	5.667	1.150	718	544	2.108
Des 10	10.422	5.530	1.194	769	667	2.262
Jan 11	10.361	5.420	1.002	788	478	2.673

Berdasarkan data selama tiga bulan terakhir, tingkat KSM peminjam yang memiliki resiko kemacetan (LAR) yaitu dari KSM aktif sebanyak 10.422 KSM, peminjam dengan kategori menunggak lebih dari 3 bulan adalah sebesar 3698 KSM (35%).

Grafik 4.3 4 Laba Tahun Berjalan UPK BKM

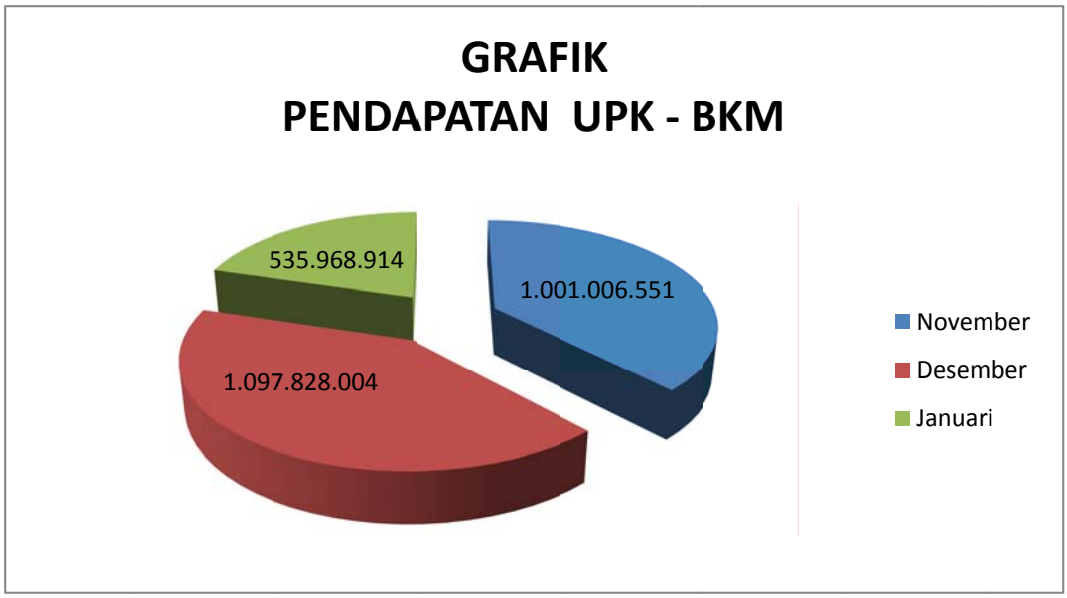

Berdasarkan hasil ratio kinerja keuangan di BKM Kota Semarang, maka dapat dilihat bahwa dengan realisasi kredit dalam 3 bulan terakhir rata-rata sebesar Rp. 25,2 M dengan nilai kemacetan yang cukup besar yakni Rp. 8 M sedangkan posisi Loan at Risk (KSM yang memiliki resiko menunggak) masih cukup besar yakni di atas 30%, namun demikian ratio Portofolio at Risk (Dana pinjaman yang beresiko) masih cukup baik yaitu berkisar antara 12% - 18% atau masih di bawah angka 20% hal ini dikarenakan adanya beberapa hal di yang secara makro kebijakan yang kurang menguntungkan bagi pelaku ekonomi skala kecil seperti KSM namun demikian melalui berbagain upaya kedepan bersama dengan berbagai pihak terutama Pemerintah Kota melalui aparatur pemerintah kelurahan dan berbagai pihak terkait akan mampu teratasi.

Tabel 4.3.5. Besarnya Nilai tunggakan kurang dari 3 bulan dan lebih dari 3 bulan

Bulan	NILAI TUNGGAKAN	
	1 - 3 bln	> 3 bln
Nop – 10	2.197.092.123	3.014.520.284
Des – 10	2.141.751.316	3.553.952.539
Jan – 11	1.737.908.899	4.519.824.717

Grafik 4.3.5. Kondisi LAR & PAR dalam kegiatan Perguliran yang ada di UPK-BKM Kota Semarang

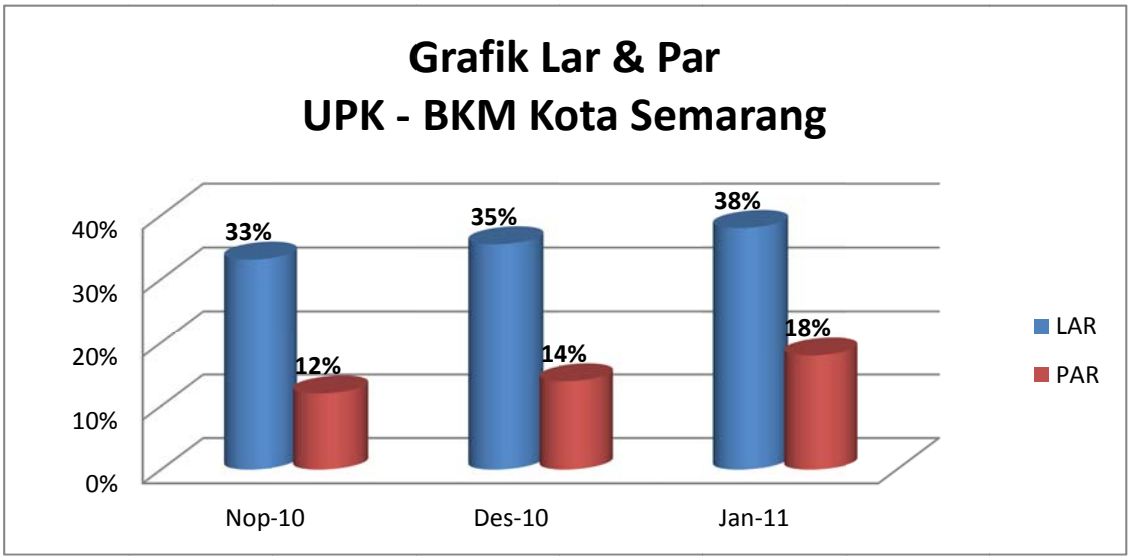

Dalam menjalankan suatu perguliran dana di masyarakat, kita mengharapkan adanya tingkat perkembangan dana yang cukup signifikan, sehingga dengan pertumbuhan tersebut maka dapat meningkatkan modal dan perputaran dana pinjaman dapat dimanfaatkan oleh KSM. Berdasarkan *Return on Investment (ROI)* yang ada pada tabel tersebut di atas, maka posisi ROI di Kota Semarang adalah sebesar 4,29%, hal ini menunjukkan bahwa dari modal yang ada sejumlah Rp. 25.569.035.519, pertumbuhan yang dapat dicapai adalah sebesar 62,82%, dan laba yang dihasilkan adalah sejumlah Rp. 1,09 M

Tabel 4.3.6. Tingkat Tabungan Masyarakat yang berhasil di himpun UPK – BKM Melalui Tabungan KSM

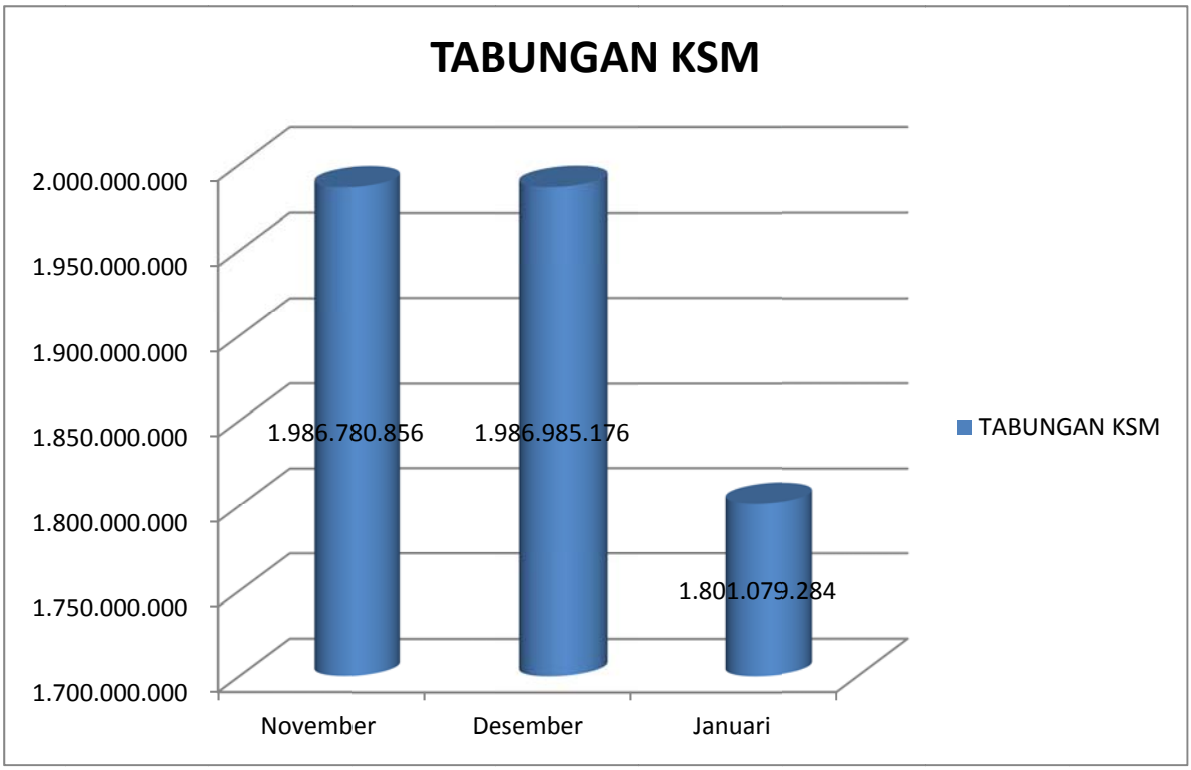

Disisi lain kegiatan Simpan Pinjam UPK – BKM juga mampu menumbuhkan kepercayan di masyarakat khususnya masyarakat miskin untuk mengelola dana mereka melalui tabungan KSM dalam jumlah yang cukup signifikan yaitu rata – rata Rp. 1,92 M yang esensinya hal tersebut dapat menumbuhkan budaya menabung di masyarakat yang tentunya sejalan dengan program PNPM dalam pemberdayaan Ekonomi masyarakat yang salah satu tujuannya adalah membudayakan sistem Pengelolaan Ekonomi Rumah Tangga (*PERT*) yang baik di masyarakat agar tingkat kehidupan mereka lebih baik.

Grafik 4.3.7 Kas & Setara Kas yang di miliki UPK – BKMKota Semarang

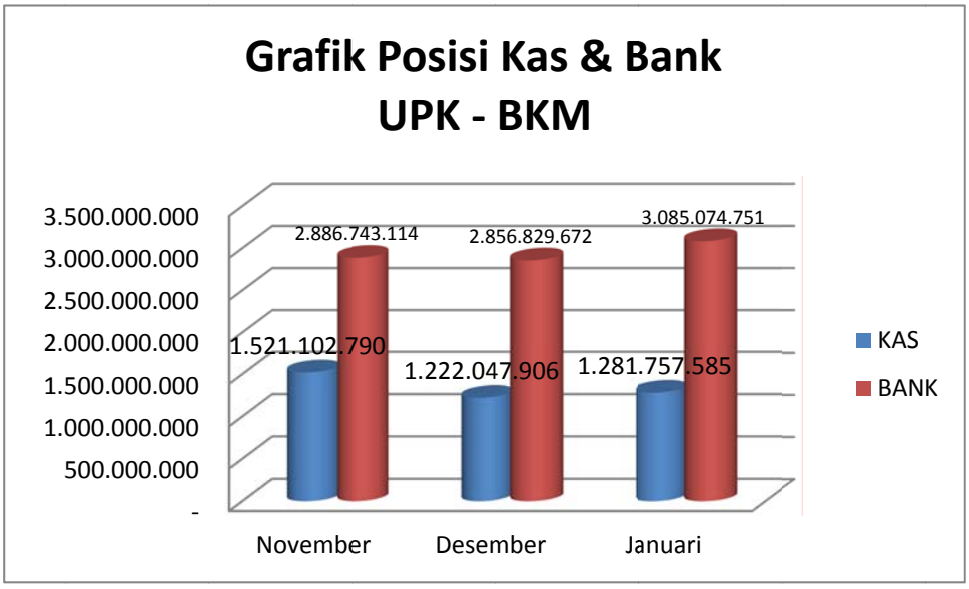

Jika melihat dari indikator Cost of Coverage di Kota Semarang, berdasarkan dari data yang tersajikan maka dapat dianalisa bahwa kemampuan untuk menghasilkan pendapatan yang diperoleh dalam tiga bulan terakhir cukup tinggi

(memuaskan), sehingga dengan hal tersebut maka profit margin dapat digunakan untuk penambahan modal, cadangan resiko kredit serta kegiatan tri daya (ekonomi, lingkungan, dan sosial) dapat direalisasikan.

4.3.2. Tinjauan Umum Kabupaten Musi Banyuasin

Kabupaten Musi Banyuasin/Kab Muba merupakan satu dari lima belas kecamatan di Sumatera Selatan/Sumsel yang memiliki luas daerah 1,4 juta hektar/ha atau mencakup 16,64 persen dari luas Sumsel sekitar 8,7 juta ha. Kab Muba merupakan kabupaten terluas kedua setelah Ogan Komering Iliar dengan luas 1,7 juta ha atau 19,60 persen dari luas Sumsel. Pada 2009, Kab Muba memiliki 11 kecamatan (Babat Toman, Plakat Tinggi, Batanghari Leko, Sanga

Desa, Sungai Keruh, Sekayu, Lais, Sungai Lilin, Keluang, Bayung Lencir, dan Lalan) dan 209 desa serta 9 kelurahan (Gambar 4.1).

Gambar 4.3.8. Peta Kabupaten Musi Banyuasin

Sumber : www.mubakab.go.id

Batas wilayah Kab. Muba adalah (i) sebelah utara berbatasan dengan Jambi, (ii) sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Muara Enim, (iii) sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Musi Rawas, dan (iv) sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Banyuasin. Kabupaten ini memiliki 80 persen berupa rawa pasang surut dan rawa lebak dan sisanya merupana lahan wara berombak dampai bergelombang yang merupakan lahan kering.

Pada 2009, jumlah penduduk Kab. Muba mencapai 523.025 jiwa. Sekitar 88 ribu penduduk bertempat tinggal di Kec. Bayung Lencir atau 16,85 persen dari total penduduk Kab Muba. Kecamatan yang berpenduduk terbesar lainnya berada di Kec. Sekayu dan Kec. Sungai Lilin masing-masing 77 ribu dan 72 ribu yang mencakup 14,73 persen dan 13,86 persen dari total penduduk Kab Muba. Menurut tingkat kepadatan penduduk tertinggi dapat ditemukan pada Kec.

Sekayu dengan rata-rata penduduk per km^2 mencapai 109,79; disusul Kec. Sanga Desa dan Plakat Tinggi masing-masing 98,15 dan 86,84.

Dua kecamatan dengan penduduk terkecil adalah Kec. Plakat Tinggi dan Kec. Batanghari Leko masing-masing 21 ribu dan 23 ribu. Jumlah penduduk tersebut hanya 4,10 persen dan 4,43 persen dari jumlah penduduk Kab Muba. Sebagian besar penduduk Kab Muba berjenis kelamin laki-laki dengan *sex ratio* 102 persen. Pada 2009 jumlah penduduk laki-laki mencapi 264. 508 jiwa sedangkan 258.517 lainnya merupakan perempuan. Struktur kependudukan Kab. Muba didominasi usia produktif. Pada 2009, usia produktif di Kab. Muba mencapai 543.526 jiwa atau 66,4 persen dari jumlah penduduk (Tabel 4.6).

Tabel 4.3.6. Karakteristik Daerah dan Kependudukan Kabupaten Musi Banyuasin 2009

Kecamatan	Jumlah Penduduk	Pangsa	Luas Daerah	Rata-rata Penduduk per Km2
Babat Toman	50.649	9,68	1.523	33,26
Plakat Tinggi	21.450	4,10	247	86,84
Batanghari Leko	23.174	4,43	2.108	10,99
Sanga Desa	31.112	5,95	317	98,15
Sungai Keruh	35.204	6,73	629	55,97
Sekayu	77.026	14,73	702	109,79
L a i s	57.125	10,92	756	75,61
Sungai Lilin	72.499	13,86	885	81,89
Keluang	28.105	5,37	401	70,16
Bayung Lencir	88.155	16,85	5.668	15,55
Lalan	38.526	7,37	1.031	37,37
Jumlah	**523.025**		**14.266**	**36,66**

Sumber : Diolah dari Badan Pusat Statistik Kab. Muba, 2009

Struktur Ekonomi Kab. Muba

Dalam periode 2005-2009, perkonomian Kab. Muba tumbuh rata-rata 6,84 persen per tahun. Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada 2005 sekitar 8,04 persen,yoy, dan menurun menjadi 6,98 persen,yoy, pada 2006. Kontraksi yang terjadi disebabkan oleh kenaikan harga minyak dunia dan berdampak pada

peningkatan biaya ekonomi. Implikasinya tergambar dari penurunan daya beli masyarakat dan pada gilirannya berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kinerja perekonomian Kab. Muba membaik pada 2007 dengan kenaikan 7,8 persen (yoy) dan kembali menyusut pada 2008 menjadi 5,6 persen (yoy) sebagai dampak kenaikan harga minyak dunia. Kinerja ekonomi Kab. Muba pada 2008 bukan saja terpengaruh oleh kenaikan harga minyak dunia tetapi dihantam oleh krisis keuangan global. Pengaruhnya sangat tergambar dari pertumbuhan ekonomi Kab. Muba pada 2009 yang hanya naik sekitar 5,77 persen (yoy). Secara struktural, ekonomi Kab. Muba sebagian besar ditopang sektor primer yang terdiri dari sektor pertanian, dan pertambangan. Sektor primer menyumbang sekitar 75,75 persen terhadap PDRB Kab. Muba; sektor sekunder menyumbang 11,07 persen; dan sektor tersier berkontribusi sekitar 13,18 persen.

Dengan sumbangan sekitar ¾ terhadap PDRB Kab. Muba pertumbuhan sektor berbasis sumberdaya alam ini masih tumbuh. Pada 2009, PDRB sektor pertambangan, sekitar 1,12 persen (yoy) sedangkan sektor pertanian tumbuh 4,47 persen (yoy). Sementara pertumbuhan pada sektor sekunder tertinggi terjadi pada sektor bangunan sekitar 9,78 persen sedangkan pada sektor tersier terjadi pada sektor angkutan sebesar 10,86 persen (yoy) [Grafik 4.3.9].

Grafik 4.3.9. Struktur Ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2009 dan Pertumbuhannya

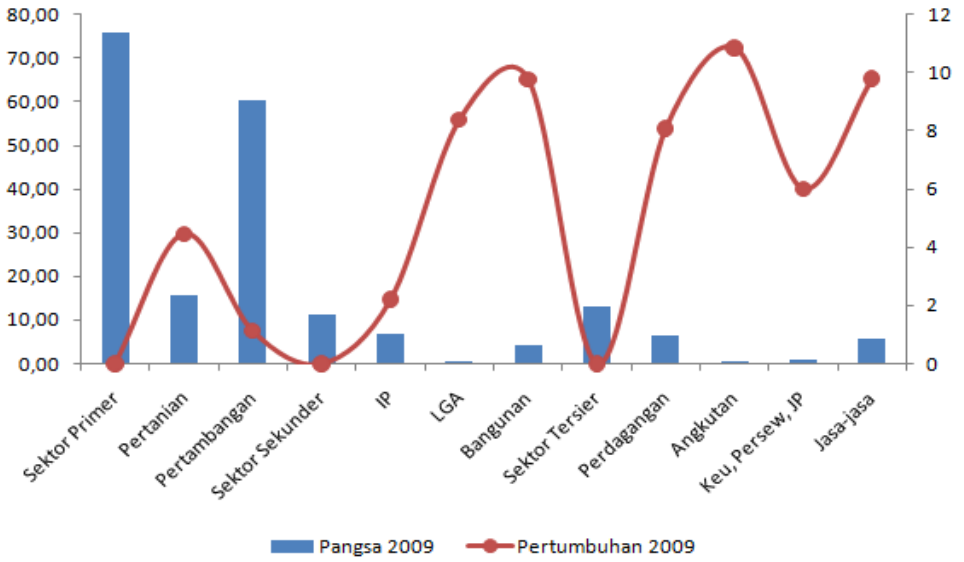

Sumber : Diolah dari Badan Pusat Statistik Kab, Musa, 2010

Selain beberapa indikator yang disebutkan sebelumnya, indikator lainnya adalah pendapatan per kapita. Selama 2005-2009 pendapatan per kapita penduduk Kab. Muba tumbuh rata-rata 3,70 persen per tahun. Perhitungan tersebut didasarkan pada konstan 2000 dan menggunakan PDRB Tanpa Migas. Sampai 2009, pendapatan per kapita Kab. Muba sekitar Rp6,8 juta per tahun Rp573.424,8 per bulan. Jika memerhitungkan dengan PDRB migas, indikator tersebut mencapai Rp17,5 juta per tahun dengan pertumbuhan 0,02 persen per tahun selama 2005-2009. Sementara itu dari sisi harga per berlaku menunjukkan angka lebih tinggi. Pendapatan per kapita Kab. Muba tanpa miga smencapai Rp16,11 juta pada 2009 dengan pertumbuhan 16,20 persen per tahun sedangkan dengan migas mencapai Rp39,55 juta dengan pertumbuhan 7,67 persen per tahun.

PNPM Kab. Musi Banyuasin

Dana PNPM menunjukkan bahwa jumlah rumah tangga miskin pada 2010 mencapai 351.721 rumah tangga miskin. Sebanyak 16,25 persen rumah tangga

miskin berada di Kota Palembang; 13,99 persen berada di Ogan Komeris Ilir; 12,38 persen berada di Banyu Asin. Beberapa kabupaten/kota yang distribusi rumah tangga miskinnya berada di atas 5 persen adalah Musi Rawas (8,13 persen); Agam Ilir (7,64 persen); Muara Enim (6,71 persen); Lahat (6,07 persen); Musi Banyuasin (6,24 persen); Oku Selatan (5,15 persen) [Tabel 4.7].

Tabel 4.3.7. Distribusi Rumah Tangga Miskin Sumatera Selatan

	Rumah Tangga Miskin	Pangsa (%)
Kota Prabumulih	3.029	0,86
Kota Pagar Alam	4.022	1,14
Kota Lubuklinggau	6.664	1,89
Ogan Komeris Ulu	11.678	3,32
Empat Lawang	13.201	3,75
Oku Selatan	18.114	5,15
Lahat	21.347	6,07
Musi Banyuasin	21.946	6,24
Oku Timur	22.708	6,46
Muara Enim	23.589	6,71
Agam Ilir	26.880	7,64
Musi Rawas	28.597	8,13
Banyu Asin	43.560	12,38
Ogan Komeris Ilir	49.217	13,99
Kota Palembang	57.169	16,25
Jumlah	351.721	

Sumber:www.simpadu-pnpm.bappenas.go.id

Pada 2011, seluruh kabupaten dan kota di Sumsel memeroleh dana PNPM, baik untuk perdesaan maupun perdesaan. Untuk PNMP Perdesaan terbesar berada di Agam Ilir mencapai 19,37 persen disusul Lahat dan Banyu Asin masing-masing 17,85 persen dan 14,53 persen. Sedangkan untuk PNPM Perkotaan sebagian besar berada di Kota Palembang, mencapai 55,17 persen dari total dana, sedangkan Kota Lubuklinggau menyerap sekitar 18,70 persen; Kota Pagar Alam 14,19 persen; dan Kota Prabumulih sebesar 11,34 persen.

Untuk anggaran infrastruktur, seluruh kabupaten memeoleh alokasinya. Terbesar di Muara Enim 7,65 persen; Ogan Komeris Ulu 6,24 persen; Lahat 6,19

persen; Oku Selatan 4,98 persen; Empat Lawang 4,93 persen; Musi Rawas 4,35 persen; Musi Banyuasin 4,33 persen; Banyu Asin; Agam Ilir 2,51 persen; dan Ogan Komeris Ilir. Sebagian besar dana Bantuan Langsung Masyakarat/BLM sebagian besar bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/APBN, mencapai 87,42 persen sisanya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/APBD sekitar 12,58 persen (Tabel 4.8).

Tabel 4.3.8. Distribusi PNPM Perdesaan, Perkotaan, dan BLM Sumatera Selatan

	Kabupaten/Kota	PNPM Perdesaan	PNPM Perkotaan	Infrastruktur Perdesaan	BLM	
					APBN	APBD
1.	Banyu Asin	23.400	-	12.650	31.370	4.680
2.	Empat Lawang	7.200	-	15.200	20.960	1.440
3.	Kota Lubuklinggau	-	5.806	-	4.988	818
4.	Kota Pagar Alam	-	4.590	-	3.860	730
5.	Kota Palembang	-	17.125	-	14.785	2.340
6.	Kota Prabumulih	-	3.521	-	2.778	743
7.	Lahat	28.750	-	19.100	42.100	5.750
8.	Muara Enim	7.200	-	23.600	16.330	1.780
9.	Musi Banyuasin	6.600	-	13.350	31.310	4.490
10.	Musi Rawas	22.450	-	13.400	31.040	4.410
11.	Agam Ilir	31.200	-	7.750	36.170	7.105
12.	Ogan Komeris Ilir	6.400	-	720	15.795	1.935
13.	Ogan Komeris Ulu	15.250	-	19.250	31.450	3.050
14.	Oku Selatan	12.600	-	15.350	25.430	2.520
15.	Total	161.050	31.042	140.370	308.366	41.791

Sumber : Diolah dari PNPM

Pada 2011, RTM di Kab. Muba mencapai 21,49 ribu. Dalam periode yang sama, pemerintah mengalokasikan sekitar Rp81,15 miliar dana PNPM. Menurut sebarannya, sebagian besar RTM di Kab. Muba berada di Kec. Bayung Lecin, mencapai 3.793 atau 17,28 persen dari total RTM. Sementara itu RTM di Kec. Sekayu mencapai 3.675 RTM. Jumlah tersebut mencakup 16,75 persen dari total RTM di Kab. Muba. Pada posisi kedua adalah Kec. Lais dengan jumlah RTM mencapai 3.173 atau menyumbang sekitar 14,46 persen terhadap total RTM di Kab. Muba.

Selain beberapa kecamatan yang disebutkan, salah satu kecamatan yang memiliki RTM terbanyak lainnya adalah Kec. Sungai Lilin. Pada kecamatan ini ditemukan sedikitnya 3.163 RTM. Jika diperhitungkan terhadap total RTM di Kab. Muba, jumlah tersebut mencakup 14,42 persen. Pada bagian lain, persentase RTM di beberapa kecamatan masih relatif rendah, rata-rata di bawah 10 persen dari total RTM di Kab. Muba. Beberapa kecamatan yang dimaksud adalah Sanga Desa (1.042 RTM atau 4,75 persen dari total RTM di Kab. Muba); Kec. Babat Toman (1.242 RTM atau 5,66 persen dari total RTM di Kab. Muba).

RTM di Kec. Batanghari Leko dan Kec. Plakat Tinggi berada di bawah 1.000 RTM sehingga hanya mendonasikan sekitar 4,49 persen dan 3,75 persen terhadap total RTM di Kab. Muba. Lainnya, seperti di Kec. Sungai Keruh, RTM mencapai 1.394 (6,35 persen) sementara di Kecamatan Keluang dan Kec. Lalan masing-masing 821 RTM (3,74 persen) dan 1.834 RTM (8,36 persen) [Tabel 4.9].

Tabel 4.3.9. Distribusi Rumah Tangga Miskin dan Alokasi BLM Menurut Kabupaten/Kota Kab. Muba

	Rumah Tangga Miskin	Pangsa (%)	BLM (Rp Juta)	Pangsa (%)
Sanga Desa	1.042	4,75	9.750	12,01
Babat Toman	1.242	5,66	4.700	5,79
Batanghari Leko	985	4,49	8.500	10,47
Plakat Tinggi	822	3,75	5.500	6,78
Sungai Keruh	1.394	6,35	5.650	6,96
Sekayu	3.675	16,75	8.350	10,29
Lais	3.173	14,46	6.500	8,01
Sungai Lilin	3.165	14,42	6.100	7,52
Keluang	821	3,74	4.500	5,55
Bayung Lencir	3.793	17,28	7.600	9,37
Lalan	1.834	8,36	14.000	17,25
Total	21.946		81.150	

Sumber:www.simpadu-pnpm.bappenas.go.id

Sampai 2010, jumlah alokasi BLM di Kab. Muba mencapai Rp81,15 miliar. Jika diamati tidak ada korelasi yang cukup kuat antara jumlah rumah tangga miskin dengn alokasi BLM di berbagai kecamatan penerimanya. Dari jumlah

tersebut, sekitar Rp14 miliar disalurkan ke Kec. Lalan. Alokasi yang demikian menyita sekitar 17,25 persen dari total BLM. Alokasi terbesar kedua berada di Kec. Sanga Desa mencapai Rp9,75 miliar (12,01 persen) sementara di alokasi BLM pada Kec. Batanghari Leko dan Selayu masing-masing Rp8,5 miliar dan Rp8,35 miliar.

Jumlah tersebut menyita sekitar 10,47 persen dan 10,29 persen dari total alokasi BLM di Kab. Muba. Sementara itu. alokasi BLM untuk beberapa kecamatam di Kab. Muba berada di bawag 10 persen dari total alokasi BLM Kab. Muba. Alokasi BLM di Kec. Bayung Lencir 9,37 persen, Lais 8,01 persen, Sungai Lilin 7,52 persen, Sungai Keruh 6,96 persen, Plakat Tinggi 6,78 persen, Babat Toman 5,79 persen dan Keluang 5,55 persen.

Pembahasan Hasil Penelitian

Dalam metode penelitian disebutkan bahwa wawancara mendalam menjadi salah satu alat yang digunakan dalam penelitian ini. Wawancara dan survei dilakukan terhadap tiga lokasi yaitu Kec. Plakat Tinggi, Kec. Babat Toman, dan Kec. Sekayu. Berikut ini akan ditampilkan hasil wawancara dan survei yang dilakukan.

Kecamatan Plakat Tinggi

Plakat Tinggi adalah sebuah kecamatan di Kab. Muba. Sebagian besar penduduk yang berada di kecamatan ini adalah transmigrasi. Sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya, Kec. Plakat Tinggi memiliki RTM mencapai 822 atau mencakup 3,75 persen dari total RTM di Kab. Muba. Selama 2007 hingga 2011, Kec. Plakat Tinggi telah menerima sekitar Rp5,5 miliar dana BLM. Alokasi tersebut mencapai 6,78 persen dari total alokasi BLM di Kab. Muba.

Sebagian besar penduduk di Kec. Plakat Tinggi merupakan transmigrasi sejak tahun 1960-an. Rumah tangga saat ini merupakan generasi ke tiga dan ke empat dari program tersebut. Sebagian besar penduduk menggantungkan

hidupnya pada subsektor perkebunan karet. Menurut hasil wawancara dengan Ketua PNPM (Bapak***) menjelaskan bahwa besarnya kebergantungan penduduk Kec. Plakat Tinggi terhadap sektor perkebunan karet sangat tergambar dari penurunan harga karet saat krisis keuangan global pada 2008. Saat itu penurunan permintaan karet (termasuk juga pada komoditas kelapa sawit) memberikan pengaru signifikan terhadap pendapatan masyarakat. Kedua komoditas tersebut merupakan komoditas unggulan Kec. Plakat Tinggi. Penyusutan harga karet misalnya sangat terasa pada Triwulan IV Tahun 2009.

Sejalan dengan itu, dalam penelitian SMERU dijelaskan bahwa penurunan harga *lump* karet di tingkat petani terjadi dari harga Rp11.500 per kg menjadi Rp2.500 per kg pada Oktober 2008. Kondisi yang demikian menyebabkan terjadinya penurunan pendapatan masyarakat hingga 400 persen dari penghasian sebelumnya. Kondisi semakin sulit karena krisis keuangan global yang terjadi pada 2008 diikuti pula dengan peningkatan inflasi. Dalam berbagai keadaan, penurunan pamor harga karet direspons oleh petani karet dengan menjadi buruh pada pabrik kelapa sawit, buruh tambang pasir, hingga buruh tani. Hal yang paling buruk adalah menjual aset.

Sementara itu, beberapa kegiatan yang terkait dengan PNPM Perdesaan adalah pemberian BLM kepada ibu rumah tangga. Cakupan pinjaman awal sekitar Rp500 ribu per orang dalam 5-10 kelompok. Sebagian besar, pinjaman belum banyak meningkat karena usaha yang digeluti oleh peminjam bergerak dalam cakupan rumah tangga seperti warung kelontong. Contoh pekerjaan lainnya adalah bisnis sayur mayur di pasar tradisional yang sebagian besar belum membutuhkan modal yang lebih besar.

Tingkat bunga yang ditetapkan adalah sekitar 1,5 persen per bulan atau 18 persen per tahun. Jika dibandingkan dengan suku bunga perbankan, tingkat suku bunga yang dikenakan oleh program tersebut tergolong tinggi. Pada 2008 misalnya, suku bunga kredit perbankan rata-rata adalah 14,16 persen per tahun atau secara bulanan rata-rata 1,18 persen. Sementara pada 2009, rata-rata suku

bunga kredit perbankan 12,70 persen per tahun atau 1,06 persen per bulan. Perbaikan kinerja perekonomian dan risiko sektor rill yang terjadi pada 2010 turut mendorong penyusutan suku bunga kredit perbankan ke level rata-rata 11,76 persen per tahun atau menjadi 0,98 persen per bulan. Hingga Juni 2011, suku bunga kredit perbankan rata-rata mencapai 10,49 persen per tahun atau secara bulanan mencapai 0,87 persen (Tabel 4.10).

Tabel 4.3.10. Perkembangan Suku Bunga Kredit Perbankan

	Tahunan				Bulanan			
Sektor	**2008**	**2009**	**2010**	**2011: Juni**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011: Juni**
Pertanian, perburuan, dan Sarana Pertanian	14,38	13,1	11,46	10,02	1,20	1,09	0,96	0,84
Pertambangan	14,83	10,95	10,57	10,21	1,24	0,91	0,88	0,85
Perindustrian	13,92	11,81	10,75	10,3	1,16	0,98	0,90	0,86
Listrik, Gas, dan Air	11,27	9,42	8,43	5,87	0,94	0,79	0,70	0,49
Konstruksi	14,18	13,3	12,19	11,52	1,18	1,11	1,02	0,96
Perdagangan, Restoran, dan Hotel	15,69	14,67	13,63	11,5	1,31	1,22	1,14	0,96
Pengangkutan, pergudangan, dan komunikasi	12,72	10,45	10,29	9,88	1,06	0,87	0,86	0,82
Jasa Dunia Usaha	14,22	13,01	12,07	11,97	1,19	1,08	1,01	1,00
Jasa Sosial Masyarakat	14,67	14,59	14,5	13,28	1,22	1,22	1,21	1,11
Lain-lain	15,71	15,74	13,73	10,37	1,31	1,31	1,14	0,86
Rata-rata	14,16	12,70	11,76	10,49	1,18	1,06	0,98	0,87

Sumber: Diolah dari Statistik Perbankan Indonesia, 2011

Jika dibandingkan dengan bunga Bank Perkreditan Rakyat/BPR, suku bunga BLM relatif lebih rendah. Data Bank Indonesia (2011) menunjukkan bahwa, rata-rata suku bunga kredit BPR pada Desember 2010 adalah 30,71 persen (rincian sektor ekonomi lihat Statistik Perbankan Indonesia) atau rata-rata 2,55 persen per bulan. Hingga Juni 2011, suku bunga kredit BPR tidak jauh menurun, dan hanya menyentuh rata-rata 30,36 persen per tahun atau 2,53 persen per tahun.

Perbandingan lainnya dapat dilihat dari tingkat suku bunga Kredit Usaha Rakyat/KUR. Kementerian Keuangan (2010) menjelaskan dua besaran suku bunga KUR yaitu:

1. KUR Mikro

KUR yang diberikan dengan plafon sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan suku bunga kredit/margin, maksimal sebesar/setara 22 persen (dua puluh dua persen) efektif pertahun. Artinya, suku bunga KUR Mikro mencapai 1,83 persen per bulan.

2. KUR Ritel:

KUR yang diberikan dengan plafon diatas Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan suku bunga kredit/margin pembiayaan, maksimal sebesar/setara 14 persen (empat belas persen) efektif pertahun. Artinya, suku bunga KUR Ritel per bulan mencapai 1,16 persen.

Menurut hasil wawancara dengan ketua PNPM Plakat Tinggi menjelaskan bahwa besaran suku bunga yang ditetapkan oleh BLM tidak begitu menjadi masalah bagi peminjam. Poin penting yang menjadi pertimbangan bagi peminjam adalah sistem administrasi yang sangat *simple* sehingga proses peminjaman dapat dilakukan kapan saja, baik pagi, sore, siang dan malam. Selain itu, agunan yang ditetapkan oleh BLM tidak serumit dan sebesar yang disyaratkan oleh perbankan. Agunan atau tanggung renteng ditetapkan dengan mewajibkan peminjam membuka tabungan di BLM. Adapun besaran yang ditetapkan sekitar 5 persen dari total pinjaman yang diterima. Namun, dalam mekanismenya besaran tanggung renteng ditetapkan berdasarkan kesepakatan.

Pembangunan infrastruktur cukup terasa di Plakat tinggi terutama untuk jalan setapak. Infrastruktur yang dihasilkan cenderung lebih bagus dengan dana yang relatif lebih murah dari pembangunan yang dilakukan oleh departemen lain. Adanya kontribusi masyarakat (swadaya) baik dalam bentuk uang maupun

tenaga berkontribusi besar terhadap kualitas dan kuantitas infrastruktur yang dibangun. Hal ini dapat berkontribusi terhadap kelancaran akses barang dan jasa dari dan ke kecamatan lainnya.

Gambar Proyek Makadam PNPM Plakat Tinggi

Sayangnya, infrastruktur vital seperti listrik belum tersedia di daerah ini (saat kunjungan) sehingga masyakarat harus mengalokasikan dana yang cukup besar untuk penyediaan mesin genset. Menurut perhitungan kasar Ketua PNPM Plakat Tinggi, biaya yang harus dikeluarkan oleh rumah tangga untuk penyediaan mesin genset mencapai Rp500 ribu hingga Rp1 juta per bulannya. Menurut sumber yang sama, jaringan listrik di kecamatan ini sudah terpasang sejak 2007. Sayangnya, listrik tersebut belum tersedia.

Kotak 4.1.

Ungkapan Rasa Syukur Warga Atas Pembangunan

Luar biasa!! Ribuan masyarakat Kecamatan Plakat Tinggi khususnya warga Desa Sidorahayu terlihat antusias mengikuti rangkaian kegiatan peringatan 31 Tahun kedatangan warga transmigrasi ke Kecamatan Plakat Tinggi, Selasa (15/3). Kegiatan tersebut sekaligus pencanangan Kecamatan Plakat Tinggi sebagai Kecamatan Pariwisata oleh Bupati Musi Banyuasin H. Pahri Azhari. Kegiatan Festival diawali dengan kirab Sedekah Bumi. Kirab Sedekah Bumi ini merupakan bentuk ungkapan rasa syukur warga Plakat Tinggi atas berkah hasil bumi serta pesatnya pembangunan di Kecamatan Plakat Tinggi.

Infrastruktur jalan dan air bersih dibangun dengan baik di kecamatan ini. Peresmian Plakat Tinggi sebagai kecamatan pariwisata akan dilakukan oleh tiga menteri yaitu Menko Perekonomian, Menteri Kehutanan, serta Menteri Hukum dan HAM pada 20 Maret mendatang.

Pada kirab Sedekah Bumi tersebut Bupati Muba H. Pahri Azhari didampingi Hj. Lucianty Pahri menaiki kereta kencana yang ditarik seekor kuda. Festival Seni Budaya Kecamatan Plakat Tinggi dihadiri oleh Sultan Mahmud Badaruddin III Prabu Diradja, Ketua DPW PAN Sumsel Iskandar SE, Anggota DPRD Muba, perwakilan ormas, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, tookoh masyarakat, serta ribuan warga KEcamatan Plakat Tinggi.

Menurut Bambang Karyanto, tokoh masyarakat Kecamatan Plakat Tinggi yang juga anggota DPRD Muba, kegiatan ini positif untuk menggali khasanah seni budaya di Muba. “Kecamatan Plakat Tinggi memiliki beragam suku dan seni budaya. Keragaman ini merupakan potensi yang harus digali dan dilestarikan, dan merupakan potensi bagi pengembangan pariwisata di Musi Banyuasin,” imbuhnya.

Senada dikemukakan, Ketua Adat suku Bali Wayan Satre. Menurutnya, Muba merupakan miniatur Indonesia, terdiri dari berbagai etnis/suku dengan keragaman budaya yang menarik, serta patut dikembangkan dan dipromosikan. Meski terdiri berbagai agama, masyarakat Plakat Tinggi sangat menjunjung persatuan dan kesatuan bangsa.

Camat Plakat Tinggi Dicky Meiriando, SSTP, MH menjelaskan, kirab Sedekah Bumi ini merupakan wujud syukur masyarakat terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkah hasil bumi yang berlimpah. Kirab ini sekaligus memohon perlindungan dari segala bahaya, serta perwujudan rasa syukur terhadap pembangunan Kecamatan Plakat Tinggi yang kian meningkat.

Pembangunan di Kecamatan Plakat Tinggi merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, memeratakan pembangunan hingga ke pelosok desa. Pada 2011 Kecamatan Plakat Tinggi mendapat alokasi dana pembangunan sebesar Rp 44 Miliar.

“Alokasi dana pembangunan untuk Kecamatan Plakat Tinggi mengalami peningkatan yang luar biasa di bawah kepemimpinan H Pahri Azhari. Pada 2010 anggaran pembangunan untuk kecamatan ini sebesar Rp 19 miliar dan akan terus meningkat di tahun berikutnya,” ujarnya.

Dicky menambahkan, Kecamatan Plakat Tinggi dengan berbagai potensi seni budaya yang dimiliki layak dijadikan sebagai kecamatan pariwisata. Seni budaya serta keragaman yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan keseharian warga, akan terus dilestarikan dan dibina untuk mendukung daerah pariwisata Musi Banyuasin.

Bupati Musi Banyuasin H. Pahri Azhari menyambut baik pelaksanaan Festival Seni Budaya Kecamatan Plakat Tinggi tersebut. Menurutnya, kegiatan tersebut harus dilestarikan dan dijadikan agenda rutin tahunan. Menurutnya, masyarakat Muba terdiri dari beragam suku, agama, etnis, ras, yang merupakan satu kesatuan.

Dia mengatakan, Kecamatan Plakat Tinggi dulunya merupakan kecamatan tertinggal. Namun, kini kondisinya sudah jauh berbeda. Plakat Tinggi telah menjelma menjadi kecamatan yang maju, bahkan dapat menjadi yang terdepan di Muba.

"Pemerataan infrastrutur ke pelosok desa hingga ke talang-talang menjadi prioritas pembangunan yang dilaksanakan pemerintah Muba sekarang. Pembangunan infrastruktur yang bersentuhan langsung dengan masyarakat jauh lebih penting, daripada pembangunan proyek mercusuar yang hanya dirasakan segelintir orang," tambah Pahri.

Dia mengatakan, Muba menjadi satu-satunya daerah di Sumsel yang APBD-nya mampu menembus lebih dari Rp 2 triliun. Dana APBD yang besar tersebut, menurut H Pahri Azhari, akan mengangkat harkat martabat masyarakat Muba menjadi jauh lebih baik.

Pada kesempatan tersebut, H Pahri Azhari menyerahkan mobil ambulans untuk kendaraan operasional Puskesmas Kecamatan Plakat Tinggi. Bupati Muba juga secara simbolis melakukan meresmikan pencanangan Plakat Tinggi sebagai Kecamatan Pariwisata Musi Banyuasin.

Sumber: http://burhan-arsyad.blogspot.com/2011/03/ungkapan-rasa-syukur-warga-atas.html

Kecamatan yang berjarak sekitar satu jam (menggunakan kenderaan roda empat) dari ibukota Kab. Muba ini baru teraliri listrik pada 2011. Sebelum teraliri listrik, pihak Perusahaan Listrik Negera/PLN beralasan kurangnya daya untuk mendukung penerangan di daerah tersebut. Selain itu belum ada keselarasan

antara program PNPM dengan program pemerintah lainnya seperti yang diinisasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum, maupun Kementerian Pertanian.

Beberapa hal yang dikeluhkan oleh ketua PNPM di Plakat Tinggi adalah relatif lamanya eksekusi dana dari pusat sehingga program yang dilaksanakan cenderung tidak terselesaikan pada tahun berjalan. Faktor lainnya terkait dengan proses Musyawarah Antar Desa/MAD yang membutuhkan jangka panjang. Dalam komunikasi dengan Ketua PNPM Plakat Tinggi, program baru dapat dimulai pada September sehingga hanya memiliki waktu tiga bulan untuk menyelesaikan program berjalan. Dari sisi teknis, masih ditemukan kendala realisasi bantuan ke pengguna karena relatif jauhnya jarak tempuh ke bank. Beberapa kondisi yang mengancam seperti perampokan yang mungkin terjadi.

Gambar Kunjungan Peneliti KEN Dengan Koordinator MAD Kec. Plakat Tinggi

Kecamatan Babat Toman

Sejalan dengan Kec. Plakat Tinggi, di Kec. Babat Toman ditemukan antusiasme masyarkat dalam melakukan pinjaman kepada PNPM Perdesaan.

PNPM PASKA KRISIS
.DESA TALANG PIASE .
JENIS KEGIATAN =JALAN SETAPAK
VOLUME = 580.MTR.
JUMBLAH DANA = 150062000.
SARANA PRASARANA =
OPERASIONAL UPK = 2% = 3159200.
OPERASIONAL TPK = 3% = 4738800.
TOTAL DANA =RP 157960000,-
WAKTU PELAKSANAAN= 60 HARI.
PELAKSANA =TPK.BERSAMA MASYARAKAT

Beberapa permasalahan yang ditemukan di kecamatan ini seperti penyalahgunaan dana, yang terjadi pada 2006. Kejadian 8 November 2006, dan diketahui 8 November 2008, terjadi di Babat Toman. Ada indikasi bahwa selama 4 bulan sekretaris dan bendahara gajinya tidak dibayar oleh ketua UPK pada 2006 oleh Ketua UPK a.n. Azhari. Kendala lainnya terkait dengan update data kecamatan yang seringkali tidak dieksekusi dengan. Hal ini tergambar dari adanya masalah pada daerah pemekaran dimana kecamatan induk tidak memeroleh dana PNPM pada tahun berikutnya. Sebagian besar pinjaman yang diberikan cenderung kurang mencukupi bagi pengguna karena relatif kecil. Untuk itu perlu adanya *linkage program* dengan lembaga keuangan lain seperti koperasi, bank umum, maupun lembaga keuangan mikro lainnya.

Pada Kec. Sekayu juga ditemukan adanya penyelewengan. Kejadian 10 Oktober 2006, dan diketahui 30 April 2007, terjadi di Sekayu. Pengelolaan pinjaman yang berasal dari dana UEP tidak memadai, jumlah dana UEP di Kec. Sekayu sejak tahun 2001 yang belum diselesaikan sampai dengan saat audit sebesar Rp. 63.527.190,dengan rincian sebagai berikut, Desa Rimba Ukure sebesar Rp. 38.390.180,dan desa Sungai batang sebesar Rp. 25.137.010. Jumlah

dana UEP tersebut cenderung tidak terselesaikan karena kurang aktifnya penagihan oleh UK.

Di Kec. Sekayu juga ditemukan adanya sanksi program karena adanya penyelewengan dana oleh kelompok BKM yang sampai sekarang belum dapat diselesaikan. Berbeda dengan Kec. Babat Toman dan Kec. Plakat Tinggi, tingkat suku bunga yang ditetapkan di Kec. Sekayu relatif lebih tinggi. Pada kedua kecamatan sebelumnya, tingkat suku bunga adalag 1,5 persen sedangkan pada Kec. Sekayu adalah 1,8 persen. Di Kec. Sekayu juga ditemukan adanya program-program pemerintah yang berjalan sendiri seperti program dari dinas perikanan. Linkage program yang disebutkan sebelumnya semakin mendesak diimplementasikan di Kec. Sekayu karena semakin besarnya kebutuhan dana. Dari kunjungan ke salah satu penerima BKM, dengan produksi kerupuk ikan maka perlu disarankan adanya merk dagang sehingga akan membantu dalam pemasaran produksi.

Dalam perkembangannya, program pemberdayaan masyarakat tidak luput dari berbagai penyelewengan. Untuk kasus Sumatera Selatan hingga Juni 2010 terdapat sekitar 88 kasus dari 955 kasus. Sebagian besar kasus yang terjadi telah masuk dalam tahapan proses mencapai 86 sedangkan yang telah selesai 2 kasus. Pada penyelewengan prinsip dan prosedur terdapat 7 kasus yang belum diselesaikan. Sebagian besar kasus yang terjadi adalah penyimpangan dana mencapai 76 kasus dan yang sudah selesai 2 kasus sedangkan kategori kasus force mejeur mencapai 3 kasus dan belum terselesaikan.

Sampai Juni 2010 tidak terdapat kasus intervensi negatif. Dalam cakupan kecamatan misalnya, kejadian 30 Oktober 2006 dan diketahui 30 April 2007, terjadi di Sanga Desa Kasus. Kasusnya adalah Terdapat perubahan penggunaan dana bergulir SPP pada UPK Sanga Desa menjadi usaha *foto copy* UPK sebesar Rp. 41.680.300, perubahan tersebut dilakukan sesuai dengan kesepakatan masyarakat desa dalam musyawarah desa. Perubahan penggunaan dana bergulir

tersebut mengakibatkan sasaran/tujuan penyediaan dana menjadi tidak maksimal.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan

Dari hasil kunjungan ke lapang, khususnya di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah diperoleh gambaran sebagai berikut:

1. Kegiatan ekonomi bergulir BKM/LKM yang ada di Kota semarang dalam perkembangan yang ada di masing – masing BKM berbeda antara satu dengan yang lain, namun secara umum kegiatan dana bergulir dapat mencapai kesuksesan dengan beberapa indikator, yaitu :

a. Ketepatan sasaran dalam pemberian pinjaman

   Kegiatan ekonomi bergulir di peruntukan bagi rumah tangga miskin yang produktif, yang membutuhkan akses permodalan untuk kegiatan usaha bagi mereka yang belum mendapat kepercayaan untuk mengakses modal usaha dari lembaga keuangan formal yang ada.

b. Pemberian pinjaman berdasarkan karakter (*character-based*) bukan kepemilikan kolateral (*colateral-based*), kondisi ini merupakan praktik yang diperlukan untuk meningkatkan pendapatan peminjam yang berpendapatan rendah

c. Besaran pinjaman sangat kecil dibandingkan dengan pinjaman yang diberikan oleh lembaga keuangan formal dan tidak bersaing dengan sumber-sumber komersial lainnya

d. Keputusan kegiatan dana pinjaman bergulir (RLF) ditetapkan dan dikelola langsung oleh masyarakat

e. Indikator dana bergulir telah mencapai kategori minimal hingga memuaskan

2. Posisi ROI di Kota Semarang adalah sebesar 4,29%, hal ini menunjukkan bahwa dari modal yang ada sejumlah Rp. 25.569.035.519, pertumbuhan yang dapat dicapai adalah sebesar 62,82%, dan laba yang dihasilkan adalah sejumlah Rp. 1,09 M.

3. Dilihat dari indikator Cost of Coverage di Kota Semarang, maka kemampuan untuk menghasilkan pendapatan yang diperoleh dalam tiga bulan terakhir cukup tinggi (memuaskan), sehingga dengan hal tersebut maka profit margin dapat digunakan untuk penambahan modal, cadangan resiko kredit serta kegiatan tri daya (ekonomi, lingkungan, dan sosial) dapat direalisasikan.

2. Rekomendasi

Dalam upaya mensukseskan program PNPM dan keberlanjutan program di masa mendatang maka, beberapa usulan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

a. Perlunya penyederhanaan tahapan proses kegiatan dan pencairan dana, hal ini guna mengantisipasi terjadinya kondisi darurat (emergency) seperti masalah krisis atau guncangan sosial ekonomi dan mekanisme pencairan dana belum selesai dapat digunakan dana talangan.

b. Perlunya koordinasi dan sinergi antara perumus kebijakan dan pelaksana program di lapang , hal ini mengingat masih ditemuinya kendala antara perencanaan dan pelaksanaan program

c. Perlunya dukungan anggaran bagi keberlangsungan program baik yang bersumber dari APBN maupun APBD di daerah penerima program PNPM.

d. Perlunya mengintegrasikanberbagai program pemberdayaan yang ada di berbagai instansi agar tidak terjadi tumpang tindih (overlap) antara satu

kementerian/instansi dengan kementerian lainnya sehingga program yang dilakukan kurang efektif dan terkoordinasi.

e. Perlunya dipikirkan keberlanjutan program PNPM dan pemanfaatan dana-dana yang sudah beredar di masyarakat agar lebih dapat diberdayagunakan untuk kegiatan ekonomi produktif.